

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jombang



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kami, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dan kepada masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memuat informasi tentang pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2024. Sesuai dengan kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mendukung Tujuan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu tujuan ke- (1) yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan publik”, sedangkan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yaitu : “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi”.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Laporan ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian semoga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan adanya laporan ini. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jombang, 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG

ENDRO WAHYUDI, S.STP

Pembina

NIP. 198005281999121001



DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
<i>MAKSUD DAN TUJUAN</i>	3
<i>LANDASAN HUKUM</i>	4
<i>TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI</i>	5
<i>ISU STRATEGIS</i>	6
<i>CASCADING KINERJA</i>	7
1.6 <i>PETA PROSES BISNIS</i>	8
1.7 <i>MANDAT DAN PERAN STRATEGIS</i>	8
1.7.1 <i>FAKTOR INTERNAL</i>	9
1.7.2 <i>FAKTOR EKSTERNAL</i>	9
1.8 <i>STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI</i>	10
<i>Ringkasan Laporan Hasil evaluasi</i>	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
RENCANA KERJA TAHUNAN	18
<i>RENCANA KERJA</i>	21
<i>PERJANJIAN KINERJA</i>	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	56
3.1.1 <i>Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini</i>	57
3.1.3 <i>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah</i>	106
1.1.4 <i>Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional</i>	107
1.1.5 <i>Analisis Atas Realisasi Kinerja</i>	118
1.2 Realisasi Anggaran	120
1.2.1 <i>Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran</i>	120
1.3 Upaya Perbaikan Kinerja	147
BAB IV PENUTUP	149

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* perlu membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi. Tujuan dari dilaksanakan sistem pertanggung jawaban (akuntabilitas) kinerja adalah dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat responsif, demokratis, memberdayakan masyarakat partisipatif, bersih dan bebas korupsi serta berorientasi pada sistem dan mekanisme pasar.

Terselenggaranya *good governance* (pemerintahan yang baik) merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka implementasinya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang jelas, tepat dan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas menyusun perencanaan strategis yang memuat visi dan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta strategis pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan

LKJIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Tujuan penyusunan LKJIP yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Bupati 37 Tahun 2025 Tentang Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang merupakan salah satu unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 76 Tahun 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jombang mempunyai kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintah daerah dibidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
6. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang hubungan masyarakat komunikasi dan informatika, bidang

statistik dan bidang persandian; dan

7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi yang akan dihadapi pada rentang waktu 2024-2026 antara lain :

1. Sosialisasi kepada media tentang pemberitaan seimbang;
2. Peningkatan kapasitas SDM di OPD yang difungsikan menjadi Humas;
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan media secara bijaksana;
4. Kurangnya optimalnya peran PPID pembantu yang ada di setiap OPD;
5. Penguatan pelayanan pengaduan pelayanan publik terpadu melalui koordinasi lintas perangkat daerah;
6. Masih rendahnya infrastruktur jaringan intra teknologi informasi dan komunikasi;
7. Masih rendahnya infrastruktur pusat data teknologi informasi dan komunikasi;
8. Belum terintegrasinya sistem aplikasi SPBE antar perangkat daerah;
9. Penguatan kualitas layanan kedaruratan 112 yang terintegrasi;
10. Penguatan daya dukung PD untuk pelaksanaan SDI; kapasitas SDM; sarpras portal satu data; data prioritas yang ditetapkan.
11. Penyusunan dan pelaksanaan sistem keamanan data rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi;

Dalam menindaklanjuti, memperbaiki dan mereleasikan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan progam dan kegiatan dalam lima tahun ke depan meliputi :

Memberikan layanan publik melalui antar instansi dengan sistem dan aplikasi. Sistem dibuat oleh PD terkait, Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan;

1. Memberikan informasi publik terkait kegiatan pembangunan melalui radio komunitas, website maupun pertunjukan;
2. Mengamankan pengamanan sistem jaringan;
3. Mempersiapkan sarana dan prasarana koneksi jaringan mulai dari Kecamatan hingga Kabupaten Jombang;
4. Menampilkan data kinerja PD di Kabupaten Jombang melalui *command center*;
5. Memperluas jangkauan radio SJFM untuk menyiarkan kegiatan pembangunan Lingkup Kabupaten Jombang.

CASCADING KINERJA

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang dalam waktu tiga tahun kedepan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Jombang yaitu terkait dengan pencapaian tujuan 1 yaituyaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan public”

Sasaran RPD dari misi 1 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik . Indikator Sasaran RPD yaitu Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP), Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks IK-TIK), Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan Informatika, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), Indeks Keamanan Informasi (KAMI), dan Nilai Evaluasi AKIP PD.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakaan kepada instansi yang bersangkutan.

Keterkaitan Renstra Kabupaten Jombang dengan RPD Dinas Kominfo Tahun 2024-2026	
Tujuan RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Publik	Tujuan OPD Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
Sasaran RPD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Sasaran OPD : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

PETA PROSES BISNIS

Dinas Kominfo telah menetapkan proses bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses Bisnis Dinas Kominfo dapat digambarkan sebagaimana terlampir

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Kemajuan teknologi Informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, yaitu suatu teknologi serbaguna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis dan berpolitik-bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang.

Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuannya yang semakin meningkat drastis justru diikuti dengan harganya yang semakin turun drastis juga. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Teknologi Informasi yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan Cahaya. Melalui *internetworking* informasi dapat disebarkan secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi.

Teknologi Informasi telah membawa dunia menuju era informasi, dimana informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi massa menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara.

Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkat teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi massa menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Secara terstruktur, lingkungan strategik dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategik, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri dari atas dua faktor strategik, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threath*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*) merupakan faktor- faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Identifikasi terhadap lingkungan strategik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menghasilkan faktor-faktor strategik sebagai berikut :

FAKTOR INTERNAL

1. Kekuatan :

- a. Mempunyai perencanaan dan mekanisme program kerja serta jadwal kegiatan yang jelas;
- b. Sebagai mediator komunikasi / informasi pemerintah kabupaten dengan masyarakat;
- c. Mempunyai sarana dan prasarana komunikasi, informasi, melalui *website*, media cetak dan media elektronik;
- d. Jumlah Pegawai yang cukup banyak.

2. Kelemahan

- a. Kualitas pegawai kurang kreatif dan rendahnya tenaga terdidik bidang komunikasi, informasi, persandian dan statistik;
- b. Kurangnya jiwa profesionalitas dalam pembagian kerja;
- c. Sistem koordinasi belum maksimal;
- d. Jumlah sumber daya manusia yang tidak memadai;
- e. Kurangnya pemahaman tugas yang diemban;

FAKTOR EKSTERNAL

1. Tantangan

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan serta tingginya jumlah pelanggaran UU ITE;
- b. Pesatnya Perkembangan TIK;
- c. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
- d. Terbatasnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap TIK
- e. Data yang tidak akurat dan terpercaya
- f. Kesenjangan Informasi di Masyarakat

2. Peluang

- a. Kepedulian pimpinan terhadap bidang Kominfo;
- b. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Kebutuhan pengembangan SPBE;
- d. Tersedianya data sektoral;
- e. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Kominfo;
- f. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi;

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Dalam menjalankan peran strategis di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Perencana.

3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Hubungan Masyarakat.

4. Bidang Aplikasi Informatika

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Infrastruktur TIK;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem e-Government; dan
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Tata Kelola e-Government.

5. Bidang Statistik dan Persandian

- a. Sub Koordinator Sub Substansi Pengelolaan dan Evaluasi Data;
- b. Sub Koordinator Sub Substansi Statistik Sektoral;
- c. Sub Koordinator Sub Substansi Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki komposisi pegawai sebagai berikut :

- Pejabat eselon II	: 1 orang
- Pejabat eselon III	: 4 orang
- Pejabat eselon IV	: 2 orang
- Fungsional	: 8 orang
- Pelaksana (ASN dan Non ASN)	: 18 orang
- Non ASN	: 12 orang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang mempunyai susunan organisasi yang terdiri :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik dan bidang hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;
 - b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral, bidang hubungan masyarakat dan pengelolaan media komunikasi publik,

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Informasi Publik;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, serta pelayanan informasi publik;
 - e. Penyiapan informasi dan komunikasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap kelompok komunikasi sosial masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penyampaian informasi melalui penerbitan (media cetak) radio, televisi dan film;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyampaian informasi dan komunikasi dengan media informasi baik pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah lembaran pers daerah, maupun unsur masyarakat umum;
 - h. Penyiapan data dan pelaksanaan kegiatan liputan, pemberitaan, pengumpulan informasi dan pendokumentasian serta komunikasi;
 - i. Penyelenggaraan penyiaran melalui radio Pemerintah Daerah;
 - j. Pelaksanaan hak jawab dan hak koreksi serta pelaporan segala bentuk media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e- Government;

- c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik dan persandian untuk keamanan informasi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise dibidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah salah satu satuan kerja yang mempunyai peran sangat strategis, yaitu sebagai penyebar informasi pembangunan Kabupaten Jombang kepada masyarakat, juga berperan sebagai penyerap informasi timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Jombang, penyelenggara bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Selain sumberdaya manusia juga memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Konektivitas Jaringan Intranet
 - a. 53 PD dan area publik menggunakan koneksi internet yang disediakan oleh Kominfo dengan bandwidth 5 Gbps dan data backup 5 Gbps;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebanyak 105 titik lokasi, diantaranya untuk koneksi privat layanan Dukcapil serta Layanan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Aplikasi dan Pusat Data
 - a. Penyediaan ruang server dengan standart ISO 27001 untuk penempatan aplikasi dan data seluruh OPD;
 - b. Layanan Cloud untuk kapabilitas aplikasi serta backup data;
 - c. Layanan email jombangkab.go.id seluruh OPD;
 - d. Sarana Layanan Kegawatdaruratan Call Center 112 selama 24 jam terkait penanganan Kecelakaan, kebakaran, kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, maupun kondisi gawat darurat lainnya;
 - e. Media publikasi dengan alamat website resmi www.jombangkab.go.id sebagai portal resmi Kabupaten Jombang.
3. Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Radio Suara Jombang 94,1 FM dengan radius hingga 25 km;
 - b. Sarana pengaduan masyarakat melalui Lapor SP4N;
 - c. Layanan Informasi Publik melalui PPID;
 - d. Media social terkait informasi berita Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Instagram di @pemkabjombang dan Youtube Channel : JombangkabTV;
 - e. Videotron sebagai layanan diseminasi informasi kepada masyarakat yang terletak di Kawasan Kebon Rojo dan Kawasan Perempatan Tugu (Jl. KH. Wachid Hasyim) Kabupaten Jombang.
4. Persandian dan Statistik
 - a. Layanan satu data Jombang terdiri dari 9529 data, 33 urusan, 63 produsen dan 33 publikasi yang dipublikasikan melalui portal sambang.jombangkab.go.id;
 - b. Tanda Tangan Elektronik bagi seluruh PD di aplikasi persuratan srikandi.arsip.go.id;
 - c. Memiliki Agen Computer Security Incident Response Team (CSIRT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari 62 orang dari Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pengelolaan Keamanan Siber dan Insiden Siber, Deteksi Anomali Insiden Siber pada Komputer terhadap pencegahan dan keamanan.

Ringkasan Laporan Hasil evaluasi

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang Nomor : X700/544/415.15/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten jombang tahun 2024, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten jombang Tahun 2024 adalah 79.19 dengan kategory BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan OPD pada Dinas Kominfo sebagaimana rincian berikut :

No	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Evaluasi	% Capaian Kinerja	Predikat
1	2	3	4	5	6 $(80\%*3)+(20\%*4)$	7 $(6/5) \times 100\%$	8
a	Perencanaan Kinerja	26,41	21,51	30	25,43	85,77%	BB
b	Pengukuran Kinerja	26,25	15,00	30	24,00	80,00%	BB
c	Pelaporan Kinerja	10,98	12,04	15	11,19	74,62%	B
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,56		25	18,56	74,25%	B
TOTAL				100	79,19		

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana kondisi di atas direkomendasikan agar:

1. a) Melakukan penyesuaian kembali atas ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dan target kinerja pada tujuan, sasaran strategis dan program kegiatan pada dokumen perencanaan tahun berikutnya, sehingga didapat keselarasan dengan dokumen perencanaan lainnya, khususnya pada indikator tujuan "Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (8 indikator)" dengan target keluaran "8 indikator terkelola", sehingga dapat diketahui kondisi kinerja yang akan dicapai pada setiap tahun perencanaan.
- b) Dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dibuat dengan perhitungan yang logis dan realistis berdasarkan basis data yang memadai serta dapat menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikan fokus untuk kenaikan target dalam setiap indikator.
- c) Melakukan revisi atas hasil monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra, yaitu tidak hanya monitoring pada program, kegiatan dan sub

kegiatan, melainkan juga pada capaian tujuan dan sasaran strategis serta memberikan analisa beserta hambatan, upaya dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja.

- d) Target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja selain dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan (reward) agar juga dapat dimanfaatkan untuk : 8 - Memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja - Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan
2. a) Hasil pengukuran kinerja yang telah dilengkapi dengan penjelasan atas capaian kinerja, upaya dan/atau hambatan, data kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan bukti tindaklanjut sebagai upaya perbaikan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai kinerja (khususnya strategi dan kebijakan pada tujuan strategis “Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE”)
 - b) Dalam pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai agar dibuatkan standar/tingkatan yang jelas atas : - pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) - pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
3. a) Pada dokumen laporan kinerja agar menambahkan informasi tentang efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.
 - b) Upaya dan/atau hambatan atas capaian kinerja yang telah dijelaskan dalam dokumen laporan kinerja agar tidak bersifat genera//umum, seharusnya dapat dijelaskan secara spesifik pada setiap sasaran strategis atau sasaran program
 - c) Informasi dalam laporan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
4. a) Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP untuk anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
 - b) Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - c) Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman pada masa kekosongan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2023 sebagai payung hukum perencanaan untuk tahun 2024-2026. RPD merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran dan strategi yang terdiri dari kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Satuan Kerja yang landasan pelaksanaan kegiatannya berlandaskan pada RPD Tahun 2024-2026.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menetapkan Rencana Strategis yang sesuai dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi tahun 2024- 2026.

RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dokumen perencanaan kinerja terangkum dalam Rencana kinerja tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/ kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan organisasi/ kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran, dan menetapkan target.

Program – program yang telah ditetapkan pelaksanaannya dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika terangkum sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR	Target	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM		
						URAIAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	7,69	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	66	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan Informasi	10%
				Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	Level 3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintah dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100%
				Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2,75 (terkelola)			
				Indeks Pembangunan Statistis (IPS)	2,2 (terkelola)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	100%
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	290 (tinggi)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	50%
				Nilai Evaluasi AKIP PD	80,05	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%

RENCANA KERJA

Kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dilengkapi dengan indikasi pendanaan yang semuanya bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024 sebagai berikut :
 Anggaran setelah perubahan : Rp. 20,672,902,497

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				K	Rp
1	3	3	4	5	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	10.842.097.183
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	Persen	100	159.499.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	118.511.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.988.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Persen	100	10.954.733.097
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	10.541.131.097
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	406.922.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.680.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	796.953.890

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				K	Rp
1	3	3	4	5	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.639.600
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	149.436.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	259.954.400
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	97.949.140
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	3	25.224.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	236.750.650
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1.474.842.300
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	761.040.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	713.802.300
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	6.943.888.689
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	88.150.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	353.775.110
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	405.993.288

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				K	Rp
1	3	3	4	5	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	3.868.054.049
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Persen	10	3.719.152.891
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen	3.3	5.991.261.741
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	1.361.432.900
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	2.168.073.301
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	189.646.690
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persen	100	5.387.174.223
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	Perangkat Daerah	53	3.477.075.840
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.771.920
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	3.365.532.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	2	9.075.444.448

	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	354.271.500
--	--	--	---------	---	-------------

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				K	Rp
1	3	3	4	5	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	656.707.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	470.941.803
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	87.500.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	366.750.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	29.700.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Persen	100	493.534.500
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Data Sektoral	28	1.811.908.648
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	280.018.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	70.598.000
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	106.282.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	36.636.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	50	230.943.700
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Perangkat Daerah	53	953.609.525

	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	41.619.875
--	---	---	---------	---	------------

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	
				K	Rp
1	3	3	4	5	
		Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	184.663.150
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	53	727.326.500

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Spesifik (*specific*)
2. Dapat Diukur (*Measurable*)
3. Dapat Dicapai (*attainable*)
4. Relevan (*relevant*)
5. Berjangka Waktu Tertentu (*time bound*), dan
6. Dapat Dipantau (*Trackable*)

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Jombang. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika setelah adanya perubahan anggaran Tahun 2024 sebagaimana berikut:

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkannya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	66 (sedang)
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	Level 3
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2,75 (terkelola)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2 (terkelola)
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	290 (tinggi)
		Nilai Evaluasi AKIP PD	80,05

Sasaran Strategis		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran					
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkannya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan Informasi	Jumlah OPD yang memiliki layanan informasi $\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki layanan informasi}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$	Kepala Dinas Kominfo

Sasaran Strategis		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran				
1	2	3	4	5	6
Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik					Jumlah OPD di Kabupaten Jombang
	Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang $\frac{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik}}{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kabupaten Jombang}} \times 100\%$
	Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika				
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Jumlah Data Sektoral perangkat daerah yang dipublikasikan $\frac{\text{Jumlah Data Sektoral perangkat daerah yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah Data Sektoral perangkat daerah}} \times 100\%$

Sasaran Strategis		Program	Sasaran Program	Indikator Program	Formulasi
Uraian	Indikator Kinerja Sasaran				
1	2	3	4	5	6
	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatkan ya Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	Jumlah Sistem Aplikasi Strategis di Kabupaten Jombang yang Berfungsi Baik $\frac{\text{Jumlah Sistem Aplikasi Strategis yang ada}}{\text{Jumlah Sistem Aplikasi Strategis yang ada}} \times 100\%$
	Nilai Evaluasi AKIP PD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya rata-rata capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah capaian kinerja pegawai Dinas Kominfo $\frac{\text{Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Dinas Kominfo}} \times 100\%$

PENGUKURAN KINERJA

Pelaksanaan akuntabilitas harus dapat dinilai dengan tolok ukur pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan mutu pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Pengukuran kinerja membutuhkan artikulasi yang jelas dari misi organisasi dan dari tujuan, sasaran yang terukur.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penjabaran atas metode pengukuran. Terhadap beberapa IKU yang dicapai dengan ketersediaan dokumen akan diberikan penjelasan sederhana terhadap bentuk dokumen dan proses penyusunan dokumen tersebut. Data-data pendukung akan dilampirkan bersama dengan laporan ini.

Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

- **Indikator 1** : Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) dengan target 84,5. Secara spesifik, dimensi dalam penyusunan I-PIKP terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:

(i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Rincian dari keempat dimensi tersebut beserta variabel, indikator, dan penjelasan dari masing- masing indikator pembentuknya yang diadopsi (diterapkan) pada Diskominfo Kabupaten Jombang berdasarkan rujukan dari penyusunan kajian IPIKP yang diselenggarakan Kemenkominfo RI tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Dimensi Input		
No	Variabel	Indikator
1	Anggaran	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP
2	Bahan Informasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita)3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV)4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring)5. Ketersediaan bahan informasi narasahid tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang6. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi

		lain 7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah
3	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi 2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi 3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4	Media dan Saluran Komunikasi	1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan 2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat 3. Pertemuan offline maupun online dengan awak media 4. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas 5. Ketersediaan media partner
Dimensi Proses		
No	Variabel	Indikator
5	Pengumpulan Data dan Informasi	1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP 2. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik 3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
6	Perencanaan	1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan 2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan 3. Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan 4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP
7	Pelaksanaan	1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah 2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang 3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka 4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi 5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi 6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 3. Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"

Dimensi Output		
No	Variabel	Indikator
9	Agenda Publik	1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah 2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah 3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi) 4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik
10	Penilaian Publik Terhadap Teknik Pelayanan Informasi Publik	1. Kepuasan terhadap akur permohonan informasi di instansi pemerintah 2. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah 3. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah 4. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah 5. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah 6. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak berbayar 7. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak 8. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah
11	Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	1. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai 2. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik 3. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 4. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat 5. Objektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) 6. Kelengkapan informasi publik pemerintah 7. Cakupan informasi publik pemerintah yang berurusan nasional dan daerah 8. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami
Dimensi Outcome		
No	Variabel	Indikator
12	Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	1. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu 2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak 3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta

		masyarakat kepada instansi pemerintah daerah
13	Pemerataan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum 2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas 4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
14	Partisipasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui 2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintahan daerah

Sumber: Dimodifikasi dari Kemendikominfo RI Tahun 2022 yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Nilai dari Diskominfo Kabupaten Jombang, khususnya Bidang HKP

Metode Pengumpulan Data I-PIKP sebagai berikut : Metode Pengumpulan Data yaitu survei data sekunder dan survei data primer. Rincian dari keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Survei Sekunder

Survei sekunder dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data-data yang telah dibukukan, dalam hal ini adalah data terkait capaian kegiatan informasi dan komunikasi publik yang sudah diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang berdasarkan dimensi, variabel, dan indikator pembentuknya. Data sekunder juga bersumber dari studi literatur/kepuustakaan, yang dilakukan dengan menganalisis isi dari literatur yang bersangkutan dengan tema kajian terkait PIKP. Analisis literatur diantaranya berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, tugas akhir, serta artikel di internet dan media massa.

2. Survei Primer

Survei primer dalam kajian ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara berbasis kuesioner, baik yang ditujukan pada internal Diskominfo Kabupaten Jombang maupun publik (pemangku kepentingan) selaku pengguna layanan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan Diskominfo Kabupaten Jombang. Rincian data primer lebih banyak menggali persepsi responden yang didominasi pada beragam indikator pembentuk dimensi output dan dimensi outcome.

- **Indikator 2** : Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK) dengan target Level 3 .

Pengukuran IK-TIK dilakukan melalui instrumen COBIT 2019, dimana di dalamnya terdapat aspek input, proses, dan output. Khusus aspek output, hubungannya bukan hanya sebatas internal tata kelola TIK, namun juga dibutuhkan validasi dari pengguna layanan yang dapat didekati dari Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM). Sifat SKM bukan untuk mengukur IK-TIK, namun sebatas untuk mendukung temuan COBIT 2019. Berdasarkan cakupan tersebut, maka sebelum dijelaskan tentang tahapan dan metode pengukuran IK-TIK, perlu diuraikan mengenai aspek dan variabel pembentuk COBIT 2019 dan unsur pembentuk SKM.

Sistematika dalam kuesioner COBIT 2019 terdiri dari aspek dan variabel yang masing-masing mempunyai arah pertanyaan berbeda-beda sesuai dengan masing-masing variabel. Aspek pembentuk kuesioner COBIT 2019 terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu: (i) aspek input; (ii) aspek proses; dan (iii) aspek output. Ketiga aspek tersebut masing-masing mempunyai variabel dan rincian daftar pertanyaan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Aspek dan Variabel Pembentuk Kuesioner COBIT 2019

No	Variabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
Aspek Input		
1	Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skala prioritas pengembangan TIK 2. Peraturan pemerintah sebagai pedoman kebijakan TIK 3. Proses evaluasi pengembangan e-government 4. Strategi kebijakan TIK 5. Keselarasan kebijakan TIK dengan visi misi instansi
2	Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan kesesuaian SDM dengan kebutuhan TIK 2. Program pelatihan TIK
3	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi pemeliharaan infrastruktur TIK 2. Proses penanggulangan bencana TIK 3. Pengelolaan keamanan informasi 4. Infrastruktur TIK terkait sarana pengamanan informasi 5. Infrastruktur terkait sarana pendukung/catu daya 6. Infrastruktur jaringan antar OPD 7. Infrastruktur terkait akses internet terpusat 8. Inventarisasi infrastruktur TIK
4	Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi aplikasi TIK 2. Situs resmi instansi /OPD
5	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit kerja yang menyusun perencanaan TIK 2. Mekanisme penyusunan perencanaan TIK 3. Rencana induk TIK 4. Anggaran penerapan TIK
Aspek Proses		
6	EDM01	1. Dokumen perencanaan dan prosedur pengelolaan TI
7	EDM02	1. Cara mempertahankan kualitas layanan TIK
8	EDM03	1. Perencanaan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pengelolaan TI
9	EDM04	1. Kepemilikan peraturan tentang pengadaan perangkat TI

No	Varabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
10	EDM05	1. Pihak eksternal yang mengatur dan mengukur kegiatan
11	AP001	1. Mengintegrasikan proses pelaksanaan TI dengan orientasi instansi
12	AP002	1. Cara instansi mengidentifikasi potensi teknologi dan mendapatkan pelayanan publik
13	AP003	1. Cara instansi memfasilitasi penciptaan TI yang optimal
14	AP004	1. Ketersediaan divisi TI pada struktur instansi
15	AP005	1. Memprioritaskan program yang didanai dan memutuskan penawaran investasi 2. Pengawasan atas manfaat penyediaan dan pemeliharaan layanan dan kapabilitas TI
16	AP006	1. Kepemilikan skala prioritas anggaran TI
17	AP007	1. Kesesuaian proses rekrutmen personal TI dengan kebijakan dan prosedur instansi
18	AP008	1. Koordinasi dalam penerapan integrasi pengelolaan jaringan dengan unit-unit lain di lingkungan instansi
19	AP009	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang TI
20	AP011	1. Cara instansi meningkatkan layanan kualitas TI
21	AP012	1. Kegiatan manajemen risiko dan evaluasi TIK
22	AP013	1. Kepemilikan keamanan TI yang memadai
23	BAJ01	1. Kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan TI dengan strategi instansi 2. Sistem pelaporan kinerja TIK
24	BAJ03	1. Pengelolaan infrastruktur, software, dan hardware 2. Identifikasi dan pengawasan infrastruktur, software, dan hardware
25	BAJ04	1. Pengawasan terhadap kapasitas dari sumberdaya TI
26	BAJ05	1. Penetapan rencana uji perubahan TI sudah sesuai dengan standar instansi
27	BAJ06	1. Perencanaan perubahan TIK yang dilakukan secara mendadak dan pendokumentasiannya
28	BAJ07	1. Penetapan rencana uji perubahan/transisi TIK sesuai standar yang ada
29	BAJ08	1. Perencanaan pengembangan SOM untuk solusi operasional
30	BAJ09	1. Pengawasan terhadap aset pengelolaan TI
31	BAJ10	1. Identifikasi dan pemeliharaan pengadaan barang-barang TI
32	DSS01	1. Implementasi prosedur operasi TI untuk mendukung kinerja instansi
33	DSS02	1. Kegiatan identifikasi, perekaman, dan pengklasifikasian permintaan layanan dan insiden, dan penetapan prioritas sesuai dengan kekritisan bisnis dan perjanjian layanan 2. Identifikasi dan mencatat gejala insiden terkait TI.

No	Varabel yang Ditanyakan	Sub-Variabel yang Ditanyakan
		penentuan kemungkinan penyebab, dan pengalokasian reaktif
34	DSS03	1. Pengelolaan permasalahan TI sesuai dengan standar
35	DSS04	1. Peningkatan pemeliharaan dan layanan software dan hardware pada instansi
36	DSS05	1. Dukungan layanan TI pada instansi
37	DSS06	1. Prosedur untuk back-up data sejalan dengan layanan dan dukungan bisnis
38	MEA01	1. Evaluasi dan penyelarasan kerangka tata kelola TI dengan tata kelola instansi secara keseluruhan
39	MEA02	1. Penilaian terhadap ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, mencakup dana yang digunakan dan kinerja yang telah ditargetkan
40	MEA03	1. Identifikasi peraturan yang harus diperuhi untuk dimasukkan dalam kebijakan instansi, standar, prosedur dan metodologi TI
Aspek Output		
41	Output	1. Kompleksitas layanan dilihat dari informasi, interaksi, transaksi dan integrasi 2. Keberadaan layanan online yang diperuntukkan untuk warga dan pelaku usaha
42	Usage	1. Keberadaan pengguna layanan online yang mengunjungi website pemerintah 2. Keberadaan pelaku usaha yang telah melakukan layanan publik secara online

Sumber: Pedoman Buku Kuesioner DCSF 2019

Unsur Pembentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Disesuaikan dengan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap output TIK merupakan kegiatan tambahan untuk melengkapi hasil analisis IK-TIK. Pengukuran SKM hanya bersifat pelengkap dan bukan merupakan metode untuk mengukur IK-TIK. Sifat dari analisis tambahan tersebut untuk mengevaluasi

kelemahan apa saja yang masih melekat dengan output (layanan) berbasis TIK yang dihasilkan oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Output (layanan) TIK adalah salah satu variabel yang dinilai dalam kuesioner COBIT 2019, dimana variabel output TIK merupakan keluaran yang bertujuan untuk menciptakan layanan publik berbasis e-government yang efisien dan efektif. Untuk mengkroscek apakah output TIK benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan, maka dibutuhkan SKM.

Ketentuan SKM dalam pengukuran IK-TIK ini akan disesuaikan dengan tujuan kajian, yaitu dihubungkan dengan TIK sebagai salah satu tata kelola untuk menciptakan pelayanan publik yang prima. Dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 (sembilan) unsur standar penilaian SKM yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah untuk menilai kinerja pelayanan publik di instansinya. Sembilan unsur yang dimaksud sudah disesuaikan dengan peruntukan jenis layanan publik berbasis TIK dengan rincian sebagai berikut:

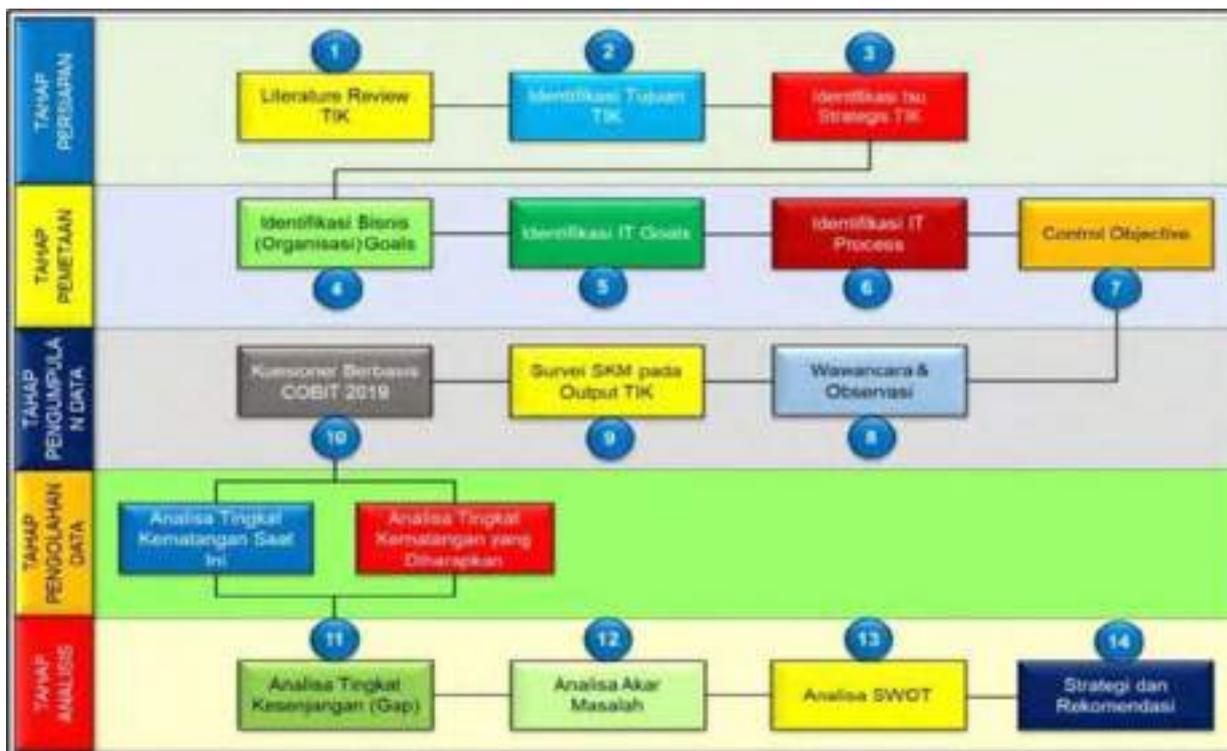
Tabel 3.2. Unsur Pembentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Penerapannya pada Layanan Publik Berbasis TIK

No	Unsur Layanan	Penjelasan
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> o Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat mempermudah persyaratan pelayanan.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> o Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. o Dalam kasus kajian ini, prosedur pelayanan yang efektif dapat dihasilkan dari output TIK.
3	Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> o Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pelayanan dengan hasil yang optimal.
4	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> o Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat menciptakan akses pelayanan yang murah bahkan gratis (tanpa biaya).
5	Produk Spesifikasi	<ul style="list-style-type: none"> o Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

No	Unsur Layanan	Penjelasan
	Jenis Pelayanan	<p>yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat memberikan efektivitas pelayanan sehingga lebih cepat dan mudah, serta sesuai dengan ketentuan pelayanan.
6	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> o Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat menggantikan fungsi petugas yang digantikan dengan pelayanan berbasis digital.
7	Perilaku Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> o Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat memberikan pelayanan yang prima karena mampu meminimalisir kesalahan jika dilakukan oleh petugas pelayanan.
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> o Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat berfungsi sebagai pelayanan pengaduan, saran dan masukan yang dapat direspons secara cepat dan tepat.
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> o Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). o Dalam kasus kajian ini, output TIK dapat berfungsi sebagai sarana dan prasarana yang lebih aksesible dan berbiaya murah bahkan tanpa biaya.

Sumber: Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang Dimodifikasi untuk Kepentingan Kajian IK-TIK

Tahapan pengukuran IK-TIK adalah rincian tahapan pelaksanaan dari awal hingga akhir yang secara operasional berpedoman pada pendekatan teknokratis dan operasional/implementatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka terdapat 5 (lima) tahapan kegiatan pengukuran IK-TIK yang di dalamnya total terdapat 14 (empat belas) sub-tahapan dari persiapan hingga penyusunan strategi dan rekomendasi. Masing-masing tahapan beserta sub-tahapan dan metode pengukurannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:



- **Indikator 3 :**

Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika dengan target 2,75 (terkelola). Indikator penilaian SPBE di bidang layanan komunikasi dan informatika adalah rata-rata nilai tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 8 indikator yaitu 2.75 yang diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu:

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
1	Pembangunan Aplikasi SPBE	Aplikasi SPBE digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi ini terdiri dari: (i) aplikasi umum; dan (ii) aplikasi khusus. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan siklus Pembangunan aplikasi yang terdiri dari tahapan: (i) perencanaan Pembangunan dan pengembangan aplikasi; (ii) proses perumusan analisiskebutuhan aplikasi; (iii) proses perancangan teknis; (iv) proses pembuatan kode program (coding) (v);	2

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		<p>proses pengujian aplikasi; dan (vi) proses implementasi aplikasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Aplikasi umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Dalam hal Perangkat Daerah tidak menggunakan aplikasi umum, maka dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum. Dalam menggunakan aplikasi sejenis, Pemerintah Daerah harus: <ul style="list-style-type: none"> (i) telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud sebelum aplikasi umum ditetapkan; (ii) melakukan kajian biaya dan manfaat; (iii) melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan aplikasi umum; dan (iv) mendapatkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika. ● Aplikasi Khusus Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. 	
2	Layanan Pusat Data	<p>Pusat data diselenggarakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya, yang harus: (i) memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data; (ii) membuat keterhubungan dengan pusat data nasional; (iii) menyediakan fasilitas bagi pakai dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain; dan (iv)</p>	3

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3	Layanan Jaringan Intra	Penggunaan jaringan intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan intra, Pemerintah Daerah menetapkan: (i) SOP penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan (ii) petunjuk teknis penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.	2
4	Penggunaan Sistem Penghubung	Pemerintah Daerah menggunakan sistem penghubung layanan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah wajib: (i) membuat keterhubungan dan akses jaringan intra instansi pusat dan Pemerintah Daerah dengan jaringan intra pemerintah; (ii) memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE; dan (iii) mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan kelayakan keamanan dari Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.	2
5	Manajemen Keamanan	Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal ini dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,	2

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
		dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.	
6	Manajemen Data	Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Data yang dihasilkan produsen data harus: (i) memenuhi standar data, yang terdiri dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan; (ii) memiliki metadata yang mengikuti struktur dan format baku; dan (iii) memenuhi kaidah interoperabilitas data, yaitu data harus konsisten dalam bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan, serta data harus disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.	2
7	Layanan Pengaduan	Layanan Pengaduan yang dimaksud adalah layanan pada LAPOR SP4N	4
8	Layanan Data Terbuka	Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain. Hal ini dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.	4

No	Indikator	Uraian Indikator	Nilai perindikator
			21

Total Nilai Perindikator _____ = $\frac{21}{8} \times 100\% = 2.63$

(terkelola) Total Indikator Dinas Kominfo 8

Adapun kriteria kematangan proses pada nilai tingkat kematangan SPBE tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 s.d. 1,99: Rintisan
- 2 s.d. 2,99: Terkelola
- 3 s.d. 3,99: Terdefinisi
- 4 s.d. 4,99: Terpadu dan Terukur
- 5: Optimum

● **Indikator 4** : Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 2,2 (terkelola).

Penilaian IPS melalui pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada :

Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR										
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik		Sesuai Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi Statistik		
	Standar Data Statistik		Metode Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi		
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi		Aktualitas & Subjektivitas Statistik		Aksesibilitas			Keberlanjutan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Sertifikasi Ketuntasan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Kelengkapan Diseminasi	Kepercayaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keberlanjutan Data	Konsistensi Statistik	
Proses Satu Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data			Pemertayaan Data		Penyempurnaan Data		
	Pertimbangan Kebutuhan	Desain Statistik	Penyajian Penyusunan	Proses Pengumpulan/Akurasi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi			
Efektivitas	Profesionalitas				SDM yang Memenuhi Sisi Kapasitas			Penggunaan Sistem Statistik			
	Transparansi Informasi	Kejelasan dan Objektivitas	Kualitas Data	Kundianisasi Sisi Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kualitas Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kualitas Pembina Statistik	Tipe Website	
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Penggunaan Hasil Statistik				Penggunaan SDI Berkeadilan			
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektorial	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Pemertayaan Pembangunan Statistik	Pertumbuhan Data	Penerbitan Big Data	

Catatan:

Domain
 Aspek
 Indikator

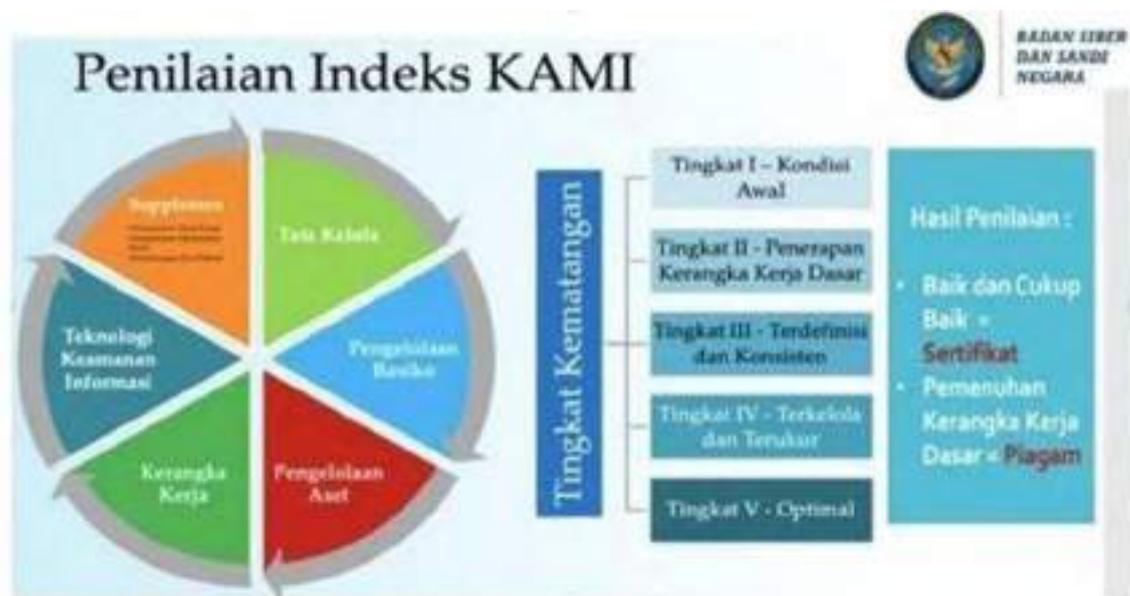
- Indikator 5** : Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan target 290 (tinggi)

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di instansi pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepadapimpinan Instansi. Proses evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di beberapa area berikut:

Penilaian Indeks KAMI ditentukan area pengukurannya mencakup hal berikut :

 - Kategori Sistem Elektronik: Pada Kategori ini untuk mengevaluasi tingkat atau kategori sistem elektronik yang digunakan

2. Tata Kelola Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan bentuk Tata Kelola Keamanan Informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi;
3. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi;
4. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya;
5. Pengelolaan Aset Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan pengamanan aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut
6. Teknologi dan Keamanan Informasi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi
7. Pelindungan Data Pribadi: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penerapan kontrol keamanan terkait Pelindungan Data Pribadi (PDP)
8. Suplemen: Pada bagian ini untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan efektivitas penerapan mekanisme keamanan terkait risiko keterlibatan pihak ketiga eksternal dalam Operasional penyelenggaraan pelayanan instansi.



Gambar 2. 1 Penilaian Indeks KAMI

Tingkat kematangan tersebut didefinisikan sebagai: Tingkat I – Kondisi Awal

Tingkat II – Penerapan Kerangka
Kerja Dasar Tingkat III – Terdefinisi
dan Konsisten Tingkat IV – Terkelola
dan Terukur
Tingkat V – Optimal

- **Indikator 6** : Nilai Evaluasi AKIP PD dengan target 80,05 Pengukuran Indikator Nilai Evaluasi AKIP PD meliputi :
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja;
 - b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja;
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, yang termasuk di dalamnya adalah penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :**

Indikator : Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan target 100%.

Pengukuran indikator meliputi Rata-rata capaian kinerja aparatur adalah ukuran persentase rata-rata pencapaian target kinerja dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan rencana kerja pelayanan yang telah ditetapkan dalam satu tahun.

Formula Perhitungan :

Jumlah capaian kinerja pegawai Dinas Kominfo

x100% Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Dinas
Kominfo

- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator : Persentase PD yang telah memiliki layanan Informasi 10%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah daerah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di suatu badan publik untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. PPID dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam UU ini, setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, wajib menunjuk PPID.

Tugas dan Fungsi PPID

- a. Menyediakan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.
- b. Mengelola dan mendokumentasikan informasi yang dimiliki badan publik.
- c. Menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
- d. Melayani permohonan informasi dari masyarakat.
- e. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
- f. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi kepada atasan badan publik.

Struktur PPID terdiri dari:

PPID Utama : Dinas Komunikasi dan
Informatika
PPID Pembantu : Perangkat
Daerah

Jenis Informasi yang Dikelola PPID :

- Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
- Informasi yang diumumkan serta-merta
- Informasi yang tersedia setiap saat
- Informasi yang dikecualikan (harus melalui proses uji konsekuensi)

Pada Indikator ini target yang diperjanjikan yaitu 10% dari 53 Perangkat Daerah yang memiliki layanan informasi.

Formula Perhitungan Indikator :

Jumlah OPD yang memiliki layanan informasi

x100% Jumlah OPD di Kabupaten Jombang

- **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Indikator : Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dengan target 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari Layanan Pemerintahan meliputi Layanan meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Layanan Publik meliputi

pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Formula Perhitungan :

Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang

$$\frac{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik sesuai dengan Masterplan/Arsitektur SPBE Kabupaten Jombang}}{\text{Jumlah Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik di Kabupaten Jombang}} \times 100$$

- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Indikator : Persentase data sektoral yang dipublikasikan dengan target 100%.

Untuk mewujudkan indikator ini diukur dari Data Statistik Sektoral. Data sektoral adalah data statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Tujuan publikasi data sektoral yaitu Perencanaan pembangunan, Penyusunan kebijakan, Evaluasi program dan Publikasi statistik sektoral di website sambang.jombangkab.go.id. Bidang Persandian dan Statistik melaksanakan Rapat Forum Data yang dilaksanakan setiap tribulan untuk pemenuhan data dari perangkat daerah sesuai ekosistem Satu Data Indonesia (SDI), di mana data: (1) Harus standar (metadata, format, dll.), (2) Memiliki kode referensi dan master data dan Harus terbuka, mudah diakses, dan dapat dibagikan.

Formula pengukuran :

Jumlah Data Sektoral perangkat daerah yang dipublikasikan

$$\frac{\text{Jumlah Data Sektoral perangkat daerah yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah Data Sektoral perangkat daerah}} \times 100\%$$

- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Indikator : Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang Berfungsi dengan Baik dengan target 50%.

Sistem Aplikasi Strategis adalah aplikasi digital yang dikembangkan dan digunakan oleh instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) yang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung proses pemerintahan, pengambilan keputusan, pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan nasional/daerah. Sistem aplikasi strategis pemerintah

daerah adalah wajib digunakan oleh semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.

Pada Kabupaten Jombang Sistem aplikasi strategis meliputi :

- 2.1 Aplikasi SIPD : Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 2.2 Aplikasi SRIKANDI : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
- 2.3 Aplikasi Kinerja BKN : Sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan memantau kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)

Formula Perhitungan :

Jumlah Sistem Aplikasi Strategis yang di Kabupaten Jombang yang Berfungsi dengan Baik

x100% Jumlah Sistem Aplikasi Strategis yang ada di Kabupaten Jombang

Dalam rangka evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>100% - 110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80% - 100%	Baik (Berhasil)
3	>60% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20% - 60%	Kurang
5	0% - 20%	Sangat Kurang

Capaian Indikator kinerja berdasarkan sasaran strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara menyeluruh melalui Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab dinas

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan Strategis merupakan Suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sesuai RPD yang dituangkan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana statejik yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program , kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan.

Pada Bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Pengukuran kinerja ini, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian target pada indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dengan realisasi.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sebagaimana disebutkan dalam Bab II, pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan capaian kinerja organisasi yaitu 1 (satu) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Sasaran Program yang memuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian IKU tersebut ditabulasi seperti tabel berikut :

**1.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	66	67.17	101.8
		Indeks Kematangan Informasi dan Komunikasi (IK-TIK)	3	3.29	100
		Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	2.75	2.75	100
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.2	2.26	102.7
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	290	612	211.0
		Niai Evaluasi AKIP PD	80.05	79.19	98.9
TOTAL CAPAIAN					100

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya rata-rata capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100 %	100 %	100%
2	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	10 %	10 %	100%
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Program Aplikasi Informatika	Persentase penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	100 %	100 %	100%

4	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Program Aplikasi Informatika	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100 %	100 %	100%
5	Meningkatnya Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik		Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	50%	50 %	100%
RATA-RATA						100%

Rata-rata capaian strategis = 100%

$\frac{\text{Rata-rata Capaian Program}}{\text{Rata-Rata Capaian Program}} \times 100\% = \text{Total Rata-Rata}$
Rata 100% Rata-Rata Capaian Program = 100%%

Berdasarkan pada penetapan Sasaran Strategis yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran strategis yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 Indikator 1 : Indeks Pengelolaa Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP) target 66 dengan realisasi 67.17

Berdasarkan hasil pengukuran, nilai I-PIKP tahun 2024 sebesar 67,17 atau dalam kategori Sedang. Nilai tersebut disumbang oleh masing-masing dimensi, yaitu:

- a. I-PIKP Dimensi Input : 67,02 (Sedang)
- b. I-PIKP Dimensi Proses : 73,86 (Baik)
- c. I-PIKP Dimensi Output : 63,02 (Sedang)
- d. I-PIKP Dimensi Outcome : 64,79 (Sedang)

Hasil pengukuran I-PIKP di tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 66,50 dan tahun 2022 yang sebesar 66,51. Relatif sedikit kenaikan di tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya variabel dan indikator, khususnya di dimensi output. Disamping hal tersebut, beberapa indikator di tahun 2024 juga menunjukkan perkembangan yang relatif tidak signifikan dan juga relatif stagnan, terutama di dimensi outcome. Meski I-PIKP meningkat, namun terdapat dimensi yang justru mengalami penurunan, antara lain:

- 1. Dimensi yang mengalami penurunan berturut-turut adalah dimensi input yang tahun 2022 masih sebesar 68,40, kemudian tahun 2023 turun menjadi 67,62 dan tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 67,02. Penurunan dimensi input banyak dipengaruhi oleh

keterbatasan alokasi anggaran, belum optimalnya peran dan fungsi KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), dan belum berjalannya fitur khusus untuk penyandang disabilitas.

2. Dimensi yang menurun di tahun 2024 tetapi sebenarnya di tahun 2023 sempat mengalami kenaikan dari tahun 2022 adalah dimensi outcome. Pada tahun 2022, dimensi outcome sebesar 64,33, kemudian tahun 2023 menjadi naik menjadi 65,33, namun tahun 2024 turun menjadi 64,79. Hal ini menandakan bahwa kinerja outcome di tahun 2024 mengalami penurunan, yang banyak dipengaruhi oleh kurang optimalnya keterwakilan

kepentingan masyarakat terhadap informasi publik, baik sektoral, spasial, maupun lapangan pekerjaan atau profesi tertentu. Selain itu, saran pengaduan (kecepatan untuk mengakomodir saran masukan dari masyarakat) masih menjadi persoalan yang di tahun 2024 belum terlalu menunjukkan progres signifikan, sehingga tingkat partisipasi publik masih relatif rendah.

3. Sementara dimensi yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2022 adalah dimensi proses dan output. Pada dimensi proses, peningkatan yang terjadi selalu signifikan, dimana tahun 2022 sebesar 68,65, kemudian tahun 2023 menjadi 71,14, dan tahun 2024 menjadi 73,86. Sementara untuk dimensi output selalu mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan pada dimensi proses. Pada tahun 2022, indeks dimensi output sebesar 60,67, kemudian tahun 2023 sebesar 61,99, dan tahun 2024 menjadi 63,02.
4. Prioritas kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP didasarkan pada masing-masing dimensi, variabel, dan indikator, yang rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Dimensi Berdasarkan analisis nilai disparitas melalui Diagram Radar, maka dimensi pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang perlu diprioritaskan atau yang harus mendapat perhatian paling tinggi terletak pada dimensi output dan kemudian disusul dimensi outcome. Sementara perbaikan dimensi input dan dimensi proses lebih ditekankan pada dimensi input karena ragam variabel dalam dimensi input mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kinerja dimensi lainnya.
 - b. Perbaikan dimensi output banyak berkaitan dengan kegiatan agenda komunikasi publik yang dilakukan melalui beragam media komunikasi, baik cetak, elektronik, maupun online. Selain itu, dimensi output juga berkaitan dengan mekanisme dan tata kelola pelayanan informasi publik yang diberikan oleh Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sementara untuk dimensi outcome, juga banyak bersinggungan dengan

kualitas pelayanan dan pelaksanaan edukasi terhadap masyarakat serta pemangku kepentingan mengenai informasi publik. Dimensi outcome juga berkaitan dengan dampak partisipasi publik terhadap pelibatan proses kegiatan pembangunan yang didasarkan pada saran serta masukan yang harus segera ditindaklanjuti, khususnya dalam aplikasi Laporan SP4N. Penekanan lain di tahun 2024 adalah pemerataan Perhitungan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-

PIKP) Tahun 2024 informasi yang mengharuskan kegiatan IKP mampu menjangkau seluruh kecamatan/desa, mampu disesuaikan dengan kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, dan peningkatan jaminan keamanan data pribadi.

- c. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Variabel. Pada total variabel pembentuk dimensi input dan dimensi proses, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel pengumpulan data dan informasi; (ii) variabel monitoring dan evaluasi; (iii) variabel anggaran; dan (iv) variabel sarana prasarana. Dari 4 variabel prioritas tersebut, yang paling diprioritaskan sebaiknya tertuju pada variabel pengumpulan data dan informasi karena nilai disparitasnya yang paling tinggi. Temuan ini tidak berbeda dengan hasil pengukuran di tahun 2023. Maka dari itu, pengumpulan data dan informasi pada Bidang HKP harus sangat diperhatikan dan ditingkatkan agar mampu menguatkan kinerja efektivitas PIKP.

Pada total variabel pembentuk dimensi output dan dimensi outcome, variabel yang perlu diprioritaskan atau yang mendapat perhatian paling tinggi secara berurutan adalah: (i) variabel agenda publik; (ii) variabel penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik; dan (iii) variabel pemerataan informasi. Kegiatan yang sangat perlu ditingkatkan adalah penguatan dan inovasi pengembangan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dengan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Selain itu, perbaikan juga dilakukan pada ranah peningkatan kuantitas maupun kualitas penyelenggaraan kegiatan komunikasi publik.

- d. Prioritas Kebijakan Berdasarkan Masing-Masing Indikator. Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi input dan dimensi proses secara berurutan adalah: (i) frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP; (ii) ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP; dan (iii) ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi". Indikator yang perlu diprioritaskan pada dimensi output dan

dimensi outcome secara berurutan adalah: (i) pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi); (ii) kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah; (iii) ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah; dan (iv) kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

- e. Strategi pengembangan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pada Diskominfo Kabupaten Jombang khususnya Bidang HKP dibedakan menjadi 4 (empat) jenis strategi, yaitu sebagai berikut:
- a. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal
 - Penguatan pengembangan TIK berbasis SDLC (System Development Life Cycle) untuk mendukung kegiatan IKP
 - Meningkatkan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online
 - Memperkuat fitur media bagi penyandang disabilitas
 - Meningkatkan jumlah program dan jenis komunikasi publik dengan media partner yang dimiliki oleh Diskominfo
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas konten informasi dan komunikasi publik pada media dan saluran komunikasi yang sudah dikelola secara mandiri.
 - b. Strategi yang Berorientasi untuk Mengoptimalkan Kekuatan Internal dalam Rangka Menghadapi Ancaman Eksternal
 - Membuat dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik
 - Penguatan inovasi program komunikasi publik yang disalurkan pada media mainstream maupun non mainstream
 - Penguatan inovasi pelayanan informasi dan komunikasi publik pada masyarakat maupun pemangku kepentingan
 - Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (Service Level Agreements)
 - Membuat program pemantauan opini dan aspirasi publik
 - c. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka Menangkap Peluang Eksternal
 - Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan IKP baik online maupun offline
 - Penyusunan kegiatan evaluasi dan memilih isu publik dalam merancang informasi berbasis program prioritas daerah
 - Pembuatan program pemantauan aduan masyarakat dengan cara pengumpulan data dan analisa aduan
 - Pembuatan program pengumpulan pendapat umum berbasis polling
 - Perlu adanya Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Laporan SP4N.

d. Strategi yang Berorientasi untuk Memperbaiki Kelemahan Internal dalam Rangka Menghadapi Ancaman Eksternal

- Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dalam lingkup kegiatan IKP
- Penguatan politik anggaran pada Diskominfo
- Penyusunan dokumen Monev dalam bentuk Policy Brief, setidaknya 3 bulanan
- Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui SOP pelayanan IKP
- Peningkatan kapasitas bandwidth pada website Pemda Jombang
- Pengumpulan data dan informasi kebijakan Pemerintah Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung capaian kinerja sasaran strategis 1 adalah :

- **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator 1 : Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi dengan target 10% dan realisasi 10%

Layanan Informasi yang dimaksud adalah PPID utama yaitu Dinas Kominfo dan PPID Pembantu yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Target 10% yaitu 5 Perangkat Daerah memiliki PPID Pembantu dari 53 Perangkat Daerah meliputi :

1. Inspektorat Kabupaten Jombang;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;
7. Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

➤ **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Indikator kegiatan adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan target Indikator 3,3%. Indikator pada penilaian kegiatan ini merupakan penilaian dari presentasi Jumlah Penduduk usia produktif di Kabupaten Jombang dengan Jumlah peserta sosialisasi yang ada pada dinas Kominfo.

Rumus :

jumlah usia produktif penduduk di
Kabupaten Jombang
_____x 100% Jumlah sosialisasi penyebaran
informasi publik yang ada di Dinas Kominfo

**DATA SOSIALISASI PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
TERKAIT KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JOMBANG**

No	Nama Aktivitas/Kegiatan	Lokasi	Jumlah Peserta	
1	Jumpa fans HUT Radio SJFM dan Pelantikan PWI	Radio SJFM	125	Peserta
2	Goes to Schooll	SMPN NGORO	60	Peserta
3	Dialog Interaktif Warung pojok Kebonrojo Lokal	Resto Arimbi Wonosalam	150	Peserta
4	Dialog Interaktif Warung pojok Kebonrojo Lokal	Pasar Barongan Mojoagung	150	Peserta
5	Rapat koordinasi KKD	AULA Dinas Kominfo	63	Peserta
6	Workshop Pejabat Penghubung Lapor SP4N	AULA Dinas Kominfo	80	Peserta
7	Sosialisasi KIM	Ds.Kwaron,Kec Diwek	90	Peserta
8	Sosialisasi SP4N LAPOR	Universitas PGRI	75	Peserta
9	Bimbingan Teknis PPID	Suro I Pemkab Jombang	75	Peserta
10	Rapat Koordinasi KKD	Aula Dinas Kominfo	65	Peserta
11	Ngopi Bareng bersama Media dan Pegian Medsos	Pendopo Kab.Jombang	200	Peserta
12	Kegiatan Kopilaborasi Pegiat Medsos dan Silaturahmi Media	RUANG BUNG TOMO	150	Peserta
14	Instagram @jombangkab	Instagram	24,600	pengikut
15	Jumlah Pengikut Instagram @kominfo_jombang	Instagram	4,477	pengikut
17	Pengikut di Youtube Jombangkab TV	Youtube	2,190	pengikut
TOTAL			32.550	

Jumlah penduduk usia produktif (15 tahun -64 tahun) dari sumber Dispendukcapil tahun 2024 adalah 967.045 orang, sosialisasi penyebaran informasi publik yaitu 32.550 tercapai dari target 3,3% yang ditetapkan.

Sub Kegiatan pada strategis 1 dan indikator 1 adalah :

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen.

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen (1) Media Cetak, (2) Media Tatap Muka (sosialisasi), (3) dan media elektronik tercapai sesuai dengan sesuai dengan target.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- **Indikator** : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen. Berupa pelaksanaan kegiatan pengelolaan media yaitu : Audiensi dengan Media, Dialog Interaktif Warung Pojok Kebon Rojo Lokal dan Regional, Jumpa Fans HUT Radio.

3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

- Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dengan target 3 dokumen dan realisasi 3 dokumen

Indikator ini ditunjukkan dengan hasil dokumen: (1) Laporan monitoring dan evaluasi PPID, (2) laporan monitoring dan evaluasi Pengaduan Lapor SP4N, dan (3) laporan monitoring dan evaluasi kegiatan KIM

Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID meliputi :

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal Jawaban
1	24-1-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	File video MP4 beserta laporan pertanggung jawaban seluruh belanja barang/jasa, video dan buku profil dan atau catalog tahun anggaran 2023 (APBD dan PAPBD)	Sosialisasi, edukasi, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, uji lab digital, dumas jika ditemukan penyimpangan	Informasi yang diminta dapat dilihat di kanal aplikasi SIRUP LKPP pada Bagian Barang dan Jasa	29-1-2024
2	29-4-2024	Baret Mega Lanang	Swasta	- Rincian Belanja PAPBD Dinas Pendidikan Tahun 2023 - Rincian Pendapatan dan Pengeluaran Dana Pasar Desa Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab.Jombang	Kelengkapan data dumas, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, transparansi publik guna dapat diinformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang	Data yang diminta sudah dilaporkan oleh pengurus pasar desa Mojoduwur kepada Pemerintah Desa Mojoduwur. Untuk informasi lebih lengkap pemohon diperkenankan datang langsung ke Kantor Desa Mojoduwur Mojowarno	22-5-2024

3	6-8-2024	Rochman Alim	Wiraswasta	Permintaan Data dan Informasi Copy/Softcopy Spesifikasi Teknis dan atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut: 1. Belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang (kode RUP: 47487142) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.182.500.000 (Data	Kontrol sosial	Diselesaikan secara internal	15-8-2024
---	----------	--------------	------------	---	----------------	------------------------------	-----------

Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal Jawaban
				<p>terlampir)</p> <p>2. Belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa khusus (kode RUP : 51565634) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.034.353.500 (Data terlampir)</p> <p>3. Belanja modal kendaraan tak bermotor angkutan barang (kode RUP : 47354638) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 123.475.200 (Data terlampir)</p> <p>4. Belanja modal taman (kode RUP : 51660630) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 1.732.000.000 (Data terlampir)</p> <p>5. Belanja modal tanah untuk bangunan gedung perdagangan/ perusahaan (kode RUP : 36110368) tahun anggaran 2024 senilai total pagu Rp. 3.048.361.800 (Data terlampir)</p>			
4	9-9-2024	Imam Subagyo	Swasta	- Permintaan Salinan Perizinan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Jaringan Telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	17-9-2024
5	21-10-2024	Imam Subagyo	Swasta	- Salinan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang sudah ditetapkan tahun 2024, Salinan Data Agen dan Kios Penyalur Pupuk (KPL) Subsidi, Salinan Data Agen dan Pangkalan Gas LPG se-Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan	1-11-2024

6	7-11-2024	Apollo Parasian Sihombing	Wiraswasta	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan yang Sumber Pendanaannya dari Bagi Hasil, Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran (TA) 2022-2023 - Pemerintah Kabupaten Jombang	Ikut serta mengambil peran dalam mengawasi penggunaan dana yang bersumber dari keuangan Negara /Daerah	Diselesaikan secara internal	20-11-2024
---	-----------	---------------------------------	------------	---	--	---------------------------------	------------

Tahun 2024

No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal Jawaban
7	12-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>1. Salinan izin operasional yang mencakup kegiatan peleburan kuningan di lokasi</p> <p>2. Bukti kepatuhan PT. Salco terhadap penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait kegiatan peleburan kuningan</p> <p>3. Izin Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau Rincian Teknis (Rintek) yang mengatur pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan/atau Limbah Non-B3 di lokasi tersebut</p> <p>4. Izin Pembuangan Air Limbah Cair (IPLC) yang berlaku untuk kegiatan peleburan kuningan di lokasi tersebut</p> <p>5. Pelaporan kinerja pengelolaan limbah, baik B3 maupun Non-B3, yang telah dilaksanakan oleh PT. Salco sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	Kontrol sosial, indikasi terjadinya kegiatan usaha ilegal oleh PT. Salco, Betek, Mojoagung	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, data tersebut berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup	18-11-2024
8	28-11-2024	Agung Suyatno, S.H.	Swasta	<p>Legalitas Industri PT. Salco</p> <p>1. Industri alas kaki yang berlokasi di Dsn.Ngembul Desa Kesamben, Kec.Kesamben Kab.Jombang apakah telah memiliki :</p> <p>a) PERTEK dan SLO</p> <p>b) Ijin Pengumpulan Limbah B3 Sementara (TPS) sebagai Penghasil</p> <p>c) Apakah bahan baku berasal dari Impor</p>	Kontrol sosial	Data yang diminta oleh pemohon tidak dalam penguasaan / belum terdokumentasikan oleh PPID Kabupaten Jombang, perusahaan tersebut berstatuskan Penanaman Modal Asing (PMA)	12-12-2024

			2. Industri Peleburan Logam Bukan Besi, di Desa Betek Barat, Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang : a) Telah memiliki			
--	--	--	---	--	--	--

Tahun 2024							
No	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal Jawaban
				PERTEK dan SLO peleburan logam bukan besi b) Apa saja varian produknya c) Dari mana dan apa saja bahan bakunya d) Pengelolaan limbahnya dengan transporter dan pemanfaat limbah B3 siapa e) Limbah Non B3 nya MoU dengan siapa			
9	11-12-2024	Ali Sutomo	Swasta	Permohonan Data Jumlah Ibu Hamil, Menyusui dan Balita di Kabupaten Jombang	Kontrol sosial	Diberikan dalam bentuk salinan softcopy	16-12-2024

Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan PPID

Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik baik internal maupun eksternal bisa digambarkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman para Pejabat PPID Utama maupun PPID Pelaksana terhadap sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
2. Minimnya informasi publik yang disediakan baik secara langsung maupun di website
3. Kurangnya koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik
4. Informasi yang tersedia kurang perbaruan
5. Rendahnya permintaan informasi di PPID

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Kabupaten Jombang dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penguatan Kapasitas Pejabat PPID Utama dan PPID Pelaksana melalui kegiatan sosialisasi
2. Memperbarui instrumen kebijakan layanan informasi dengan menyesuaikan perubahan kebijakan layanan informasi di atasnya, seperti SK PPID, DIP, LLD dsb
3. Meningkatkan publikasi informasi dengan memperbaiki website PPID Kabupaten Jombang dan PPID Pelaksana

4. Memberbarui konten dan update data pada website PPID Utama dan PPID Pelaksana
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Pelaksana

**HASIL MONITORING PENGELOLAAN SP4N-LAPOR
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PERIODE : OKTOBER – DESEMBER 2024**

Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang

NO	INDIKATOR	HASIL	KETERANGAN
1	Pengelolaan Laporan :		
	a. Total Laporan	61 Laporan (tanpa arsip dan tunda)	
	b. Belum Diverifikasi	0 Laporan	
	c. Belum Ditindaklanjuti	2 Laporan	
	d. Proses	16 Laporan	
	e. Selesai	43 Laporan	
	f. Laporan Berulang / Arsip	9 Laporan	
	g. Rata-rata Tindak Lanjut (RTL)	1.5 Hari	
2	Kualitas Tindak Lanjut (% tindaklanjut)	Baik Sekali : 96.7%	
3.	Renaksi Tahun 2024	1. Workshop Bagi Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR! 2. Sosialisasi SP4N-LAPOR!	
4.	Kendala dan Hambatan	1. Masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat 2. Masyarakat takut dan enggan untuk melapor 3. Kurangnya respon cepat dan kualitas tindaklanjut dari OPD yang berwenang 4. Belum terintegrasinya kanal pengaduan lain dengan SP4N – LAPOR 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kanal pengaduan SP4N-LAPOR 6. Tidak semua lapisan masyarakat bisa menggunakan kanal pengaduan SP4n-LAPOR 7. Masyarakat lebih memilih pengaduan yang mudah dan praktis (melalui telepon/ media sosial)	

5. Alternatif / Upaya yang Telah Dilakukan

- a) Mengedarkan x-banner SP4N LAPOR ke desa-desa di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang



b) Sosialisasi SP4N-LAPOR!



c) Rapat Pejabat Penghubung SP4N-LAPOR!



d) Sosialisasi melalui banner, youtube, radio SJFM, videotron, Instagram

- e) Menyampaikan di kegiatan sosialisasi SP4N-LAPOR! bahwa di dalam web/aplikasi SP4N LAPOR ada fitur Anonim dan Rahasia, sehingga identitas pelapor aman
- f) Admin Kabupaten rutin menghubungi admin OPD apabila ada aduan yang terkait dengan OPD tersebut agar segera ditindaklanjuti, dan memantau tindak lanjut dari aduan tersebut sampai selesai.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan Lembaga/Instansi guna memaksimalkan penggunaan aplikasi SP4N LAPOR



- h) Mengarahkan admin OPD untuk menginput pengaduan manual yang masuk ke OPD tersebut melalui fitur input pengaduan manual di web SP4N-LAPOR!
- i) Melaksanakan kolaborasi antar instansi guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan mendorong pelaksanaan integrasi SP4N-LAPOR!

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang

NO	INDIKATOR	HASIL	KETERANGAN
1	Pengelolaan Laporan :		
	a. Total Laporan	1 (tanpa arsip dan tunda)	
	b. Belum Diverifikasi	0 Laporan	
	c. Belum Ditindaklanjuti	0 Laporan	
	d. Proses	0 Laporan	
	e. Selesai	1 Laporan	

Dari hasil penanganan saran pengaduan kepada seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang, pada website SP4N – LAPOR selama 3 (tiga) bulan antara Oktober-Desember tahun 2024 ini, dapat kami simpulkan :

1. Jumlah saran dan pengaduan yang masuk di website SP4N – LAPOR adalah sebanyak 61 laporan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Saran dan pengaduan belum ditindaklanjuti : 2 laporan
 - Saran dan pengaduan masih dalam proses : 16 laporan
 - Saran dan pengaduan sudah diselesaikan : 43 laporan
2. Semua saran dan pengaduan yang masuk sudah mendapatkan tanggapan dari OPD terkait.
3. Waktu yang dibutuhkan oleh unit organisasi terkait untuk memberikan tanggapan terhadap saran dan pengaduan yang masuk bervariasi, rata-rata membutuhkan waktu selama 1.5 hari untuk menindaklanjuti saran maupun pengaduan dan masuk penanganan tindak lanjut aduan dalam kategori BAIK (<3 hari). Hal ini dikarenakan telah terlaksananya komitmen bersama dalam melaksanakan standar operasional prosedur tentang prosedur penanganan pengaduan di SP4N – LAPOR;
4. Koordinasi saran dan pengaduan yang masuk antara unit organisasi dengan unit kerja teknis terkait dibutuhkan waktu yang tidak terlalu lama.
5. Aplikasi pengaduan SP4N - LAPOR sudah tersambung ke semua unit kerja atau unit pelaksana teknis terkait.

Sementara untuk penanganan SP4N-LAPOR! selama periode Oktober – Desember 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dapat kami simpulkan :

1. Jumlah laporan yang masuk ke SP4N-LAPOR! Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, dengan rincian :
 - Laporan Masuk : 1 laporan
 - Belum diverifikasi : 0 laporan
 - Belum ditindaklanjuti : 0 laporan
 - Proses : 0 laporan
 - Selesai : 1 laporan

Hasil Rekapitulasi Laporan SP4N Kabupaten Tahun 2024 meliputi sebagai berikut :

Belum Terverifikasi : 0

Laporan Belum Ditindaklanjuti : 0

Laporan Proses	: 24
Laporan	
Selesai	: 558 Laporan
Tunda	: 0 Laporan
Arsip	: 40 Laporan

Laporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan KIM

Pembinaan dan Pelatihan KIM di Balai Desa Kwaron Kecamatan Diwek Jombang dengan narasumber Muhammad Mufid, Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jombang, Muchtar Bagus, Founder Join (Jombang Informasi) Media dan Ketua KIM Kwaron Diwek Saiful Mualimin dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 90 orang.

2. Sasaran Strategis 1 Indikator 2 : Indeks Kematangan Informasi dan Komunikasi (IK- TIK) dengan target 3 dan realisasi 3,29 tercapai 100%

1. Berdasarkan hasil pengukuran nilai Indeks Kematangan TIK tahun 2024 sebesar 3,29 atau dalam kategori Sedang. Nilai tersebut disumbang oleh masing-masing dimensi, yaitu:

- a. Hasil pengukuran IK-TIK tahun 2024 sebesar 3,29 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut dimasukkan dalam Level 3. Nilai ini mengalami peningkatan namun tidak cukup berarti dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,22 (Kategori Baik). Margin peningkatan tahun 2024 dari tahun 2024 hanya sebesar 0,07 poin.
- b. Nilai IK-TIK di tahun 2024 disumbang oleh masing-masing domain yang dinilai dominan pengaruhnya dalam kinerja tata kelola TIK Kabupaten Jombang, yaitu APO11, APO13, DSS02, dan DSS03.
 - o Domain APO menyangkut infrastruktur TI, SDM, pengadaan barang TI, pengelolaan jaringan, pemeliharaan dan kapabilitas TI, investasi TI, dan pengelolaan kualitas TI.
 - o Sementara domain DSS berkaitan dengan prioritas layanan, risiko TI, hardware dan software, dan tata kelola organisasi TI. Nilai indeks pada APO11 sebesar 3,68, untuk domain APO13 sebesar 3,21, untuk domain DSS02 sebesar 3,17, dan untuk domain DSS03 sebesar 3,11.
- c. Domain yang mengalami peningkatan lebih besar dari domain lainnya di tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 adalah DSS03 dan DSS02. Domain tersebut banyak disebabkan karena adanya perbaikan dalam aspek proses tata kelola TIK, misalnya peningkatan kematangan kebijakan internal arsitektur SPBE, peningkatan internal manajemen data, pembangunan aplikasi, internal layanan pusat data, layanan

jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan instansi, keamanan informasi, audit aplikasi, dan audit keamanan aplikasi.

2. Evaluasi kinerja tata kelola TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang juga didasarkan pada hasil penilaian terhadap kualitas pelayanan public berbasis output TIK, yang dievaluasi melalui pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran SKM juga mendukung pengukuran IK-TIK khususnya pada aspek output dengan menilai tingkat kepuasan masyarakat

atas pelayanan publik berbasis output TIK. Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan indeks rata-rata sebesar 3,06 dan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berbasis output TIK sebesar 78,19 atau dalam kategori B atau “Baik”. Indeks kepuasan tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 78,22. Penurunan ini banyak dipengaruhi oleh tuntutan terhadap kualitas website dan aplikais yang semakin meningkat, terutama dari sisi muatan/konten yang seharusnya mencakup informasi, interaksi, transaksi, dan integrasi.

3. Akar masalah secara umum dalam meningkatkan kematangan tata kelola TIK pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang adalah: (i) terbatasnya SDM TIK di masing-masing Perangkat Daerah; (ii) tidak semua Perangkat Daerah mempunyai bagian khusus pengelola TIK; (iii) rendahnya alokasi anggaran tata kelola TIK; (iv) terbatasnya jumlah sarana prasarana penunjang kegiatan tata kelola TIK; (v) rendahnya pendokumentasian kendala dan masalah kualitas layanan; (vi) belum adanya bentuk baku (SOP) penanganan masalah TIK; (vii) belum adanya dokumen terkait pemetaan jenis dan kategori insiden dan solusinya; (viii) belum optimalnya kebijakan internal manajemen keamanan informasi; (ix) belum optimalnya kebijakan internal audit TIK; dan (x) belum optimalnya manajemen aset TIK
4. Strategi dan program peningkatan kinerja tata kelola TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) strategi dan program peningkatan kematangan tata kelola TIK dari analisis COBIT 2019; dan
(ii) strategi dan program perbaikan layanan publik berbasis output TIK dari analisis SKM.
 - a. Strategi dan program peningkatan kematangan tata kelola TIK sebaiknya difokuskan pada: (i) pembuatan SOP penanganan masalah dan solusi TIK;
(ii) SOP penyelesaian insiden pada keamanan software dan layanan informasi; (iii) penyusunan laporan rutin masalah dan solusi TIK; (iv) peningkatan anggaran TIK; dan (v) penyusunan roadmap penanganan risiko keamanan.
 - b. Strategi dan program perbaikan layanan publik berbasis output TIK sebaiknya difokuskan pada: (i) peningkatan kualitas sarana

pengaduan platform online; (ii) peningkatan kecepatan tindak lanjut atas pengaduan yang diberikan pengguna layanan; (iii) perbaikan fitur data pelayanan pada website/aplikasi; (iv) perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami; (v) perbaikan website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, vote pendapat, dan statistik pengunjung (web traffic); (vi) pengembangan fitur interaksi petugas pelayanan pada website/aplikasi; dan
(vii) pengembangan fitur interactivity seperti fasilitas email, layanan telfon, dan alamat.

- **PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

Indikator dalam Program Aplikasi Informatika yaitu Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dengan target 100% dan realisasi 100%

**Data Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik
Tahun 2024**

LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN :

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	BAG ORGANISASI	BRAVO	bravo.jombangkab.go.id	Sistem Data Reformasi Birokrasi
2	BAG ORGANISASI	SUKMASANTRI	sukmasantri.jombangkab.go.id	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jombang
3	BAG ORGANISASI	E-SAKIP	e-sakip.jombangkab.go.id	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4	BAG PBJ	SIBAJA	sibaja.jombangkab.go.id	Layanan Perencanaan Barang dan Jasa
5	BAG PBJ	SPSE	lpse.jombangkab.go.id	Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
6	BAG PEMBANGUNAN	E-MONEV	monev.jombangkab.go.id	Layanan Realisasi Anggaran
7	BAG PEMERINTAHAN	LPPD	lppd.jombangkab.go.id	Sistem Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8	BAG PEMERINTAHAN	LENTERA/LAKSAMANA	lentera.jombangkab.go.id	Layanan Elektronik Tata Pemerintahan yang terdiri dari layanan e-LPPD dan Sistem Informasi Layanan Kerjasama.
9	BAKESBANGPOL	KESBANGPOLSMART	kesbangpolmart.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Partai Politik dan Organisasi Masyarakat
10	BAPPEDA	E-HIBAH	e-hibah.jombangkab.go.id	Sistem usulan hibah dan bantuan sosial
11	BAPPEDA	E-LITBANG	e-litbang.jombangkab.go.id	Sistem Penelitian dan Pengembangan di BAPPEDA

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
12	BAPPEDA	SIPERANSINDER	monev.jombangkab.go.id/siperansinder	Sistem Informasi Pengarusutamaan Gender
13	BAPPEDA	BERKADANG	berkadang2.jombangkab.go.id/login?next_url=2023/home	Sistem Monev Berkadang
14	BAPPEDA	STUNTING	joss.jombangkab.go.id	Jombang Stop Stunting) merupakan aplikasi stunting dari P2KB Jombang yang mereview capaian stunting di wilayah kecamatan
15	BAPPEDA	E-PIPA / Jos dev	pipa.jombangkab.go.id, jos-dev.jombangkab.go.id	Sistem Pagu Indikatif Pengguna Anggaran
16	BKPSDM	SIAP ASN	siapasn.jombangkab.go.id	Layanan Kepegawaian
17	BPKAD	SILELA	silela.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Lelang Aset OPD
18	BPKAD	E-BMD	e-bmd.jombangkab.go.id	Sistem aplikasi keuangan yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD)
19	DINAS DAGRIN	DIPUN AGEM	dipunagem-dagrין.jombangkab.go.id	Layanan Sentra Industri IKM Kabupaten Jombang
20	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	mutasis.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Mutasi Siswa yang dibuat khusus untuk membantu proses perpindahan siswa baik masuk maupun keluar daerah Kabupaten Jombang
21	DINAS DIKBUD	WEB DISDIKBUD	eai.disdikbud.jombangkab.go.id	Layanan Arsip Ijazah dikbud
22	DINAS KESEHATAN	SIMPUS	simpus.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Puskesmas
23	DINAS KESEHATAN	E-SPM	e-spm.dinkes.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal
24	DINAS KETAPRIK	E-BANTUAN	e-bantuan-dev.jombangkab.go.id	Aplikasi bantuan

25	DINAS KOMINFO	SAMBANG	sambang.jombangkab.go.id	Layanan Satu Data Jombang
----	---------------	---------	--------------------------	------------------------------

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
26	DINAS KOMINFO	SATSET	satset.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik
27	DINAS KOMINFO	DATA COVID	datacovid.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Data Covid-19 Kabupaten Jombang
28	DINAS KOMINFO	HELPDESK	helpdesk.jombangkab.go.id	Help Desk Pemerintah Kabupaten Jombang
29	DINAS KOMINFO	TEMPLATE SRIKANDI	template.jombangkab.go.id	Template naskah menggunakan SRIKANDI di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
30	DINAS KOMINFO	CSIRT	csirt.jombangkab.go.id	Sistem Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia
31	DINAS KOMINFO	E-OFFICE (2023)	e-office-2025.jombangkab.go.id	Sistem Presensi dan Aktivitas TPP Pegawai Pemkab Jombang
32	DINAS KOMINFO	E-CLOUD	cloud.jombangkab.go.id	Sistem Cloud Penyimpanan Dokumen
33	DINAS KOMINFO	LAYANAN SPBE	layanan.jombangkab.go.id	Helpdesk Layanan Aplikasi
34	DINAS KOMINFO	SIMPAN	simpan.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan Pemerintah
35	DINAS KOMINFO	E-SULASH	e-sulash.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
36	DINAS KOMINFO	UJICOBA	ujicoba.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Usulan Standar Harga
37	DINAS KOMINFO	SSO	sso.jombangkab.go.id	Single Sign-On (SSO) adalah mekanisme autentikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai aplikasi atau layanan melalui satu kali login
38	DINAS LH	SIALI	siali.dlh.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Resik Kali

39	DINAS PERHUBUNGAN	UJI KIR	ujikir.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Uji KIR
----	----------------------	---------	-------------------------	------------------------

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
40	DINAS PERKIM	SIWON	siwon.jombangkab.go.id	Sistem Informasi WC Online (SIWON)
41	DINAS PERTANIAN	E-TRAKTOR	traktor-pertanian.jombangkab.go.id	Sistem Traking dan Monitoring Data Pertanian
42	DINAS PETERNAKAN	SIPERA-SP	sipera-sp.jombangkab.go.id	Sistem Pengendalian Pemeliharaan Sarana Prasarana Aset Dinas Peternakan
43	DINAS PUPR	SIJAKI	sijaki-dev.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Jombang
44	DINAS PUPR	SIMENARA	simenara.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Menara
45	DINAS SOSIAL	INTUISI	intuisi.jombangkab.go.id	Layanan DATA PMKS dan PSKS
46	DISPORAPAR	SIKEMBANG	sikembang.jombangkab.go.id	Sistem sarana publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran tentang potensi dibidang olahraga di Kabupaten Jombang
47	DPMPTSP	GIS POTENSI	gispotensi.jombangkab.go.id	Sistem Aplikasi berbasis Data Geospasial berbentuk peta digital, sebagai informasi untuk pelaku usaha maupun masyarakat, tentang POTENSI / Peluang INVESTASI di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Jombang.
48	KEC MOJOWARNO	SIGAP	sigap.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Mojowarno
49	KEC PETERONGAN	PECELJAGUNG	pecel-jagung.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Peterongan
50	KEC PLANDAAN	SIPADUKA	sipaduka.jombangkab.go.id	Sistem Pelayanan Kecamatan Plandaan

LAYANAN PUBLIK :

NO	PERANGKAT DAERAH	APLIKASI	SUBDOMAIN	KETERANGAN
1	DPMPD	SAPDOPALON v2.0	sabdopalon2.jombangkab.go.id	SABDOPALON menyediakan akses pada setiap warga Kabupaten Jombang untuk mendapatkan pelayanan surat secara online serta dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dan Terintegrasi dengan data sosial masyarakat di Kabupaten Jombang (Data kesejahteraan masyarakat, Data Stunting dan Data social lainnya) yang berbasis Data kependudukan. Layanan SABDDOPALON meliputi 54 layanan.
2	DINAS LH	SILAJANG	silajang.jombangkab.go.id	Sistem Informasi Laboratorium Lingkungan Jombang
3	DPMPPTSP	SIRINDUNONA	perizinan.jombangkab.go.id	Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha
4	BAPENDA	APP BAPENDA	bapenda.jombangkab.go.id	Sistem Layanan Wajib Pajak
5	DUKCAPIL	YAONAH	dukcapil-web.jombangkab.go.id/yaonah/daftar	Sistem Layanan Online Penduduk meliputi KTP El, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Ket Pindah (Pindah dari Jombang), Surat Ket Datang (Datang ke Jombang), Online NIK/KK, dan SKTT bagi WNA

Total :

Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu

50 Layanan Publik yaitu 5

Layanan Administrasi Pemerintahan dan

Layanan Publik yaitu 55

- **Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet dengan target 100% dan realisasi 100%**

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pasal 27 mengamanatkan bahwa jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah. Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Simpul jaringan sebagaimana dimaksud terdiri dari : (1) Perangkat daerah (termasuk kantor, kecamatan, kantor kelurahan dan kantor unit pelaksana teknis; (2) Satuan Pendidikan; (3) Pemerintah Desa; (4) Instansi Pemerintahan/publik strategis lainnya.

Dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, Jaringan Intra diselenggarakan oleh Dinas Kominfo yang menggunakan penyedia jasa akses internet sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023 Jaringan Intra sudah terhubung pada seluruh OPD di Kabupaten Jombang sehingga target 100% telah tercapai pada indikator ini.

**REKAPITULASI DATA BANDWITH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET PEMERINTAH YANG BERKUALITAS
DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWITH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	200 Mbps
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200 Mbps
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	200 Mbps
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	200 Mbps
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	200 Mbps
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	200 Mbps
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	200 Mbps
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200 Mbps
9	DINAS PERHUBUNGAN	200 Mbps
10	DINAS PERTANIAN	200 Mbps
11	DINAS PETERNAKAN	200 Mbps

12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	200 Mbps
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	200 Mbps
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	200 Mbps

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWITH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
15	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	200 Mbps
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	200 Mbps
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200 Mbps
18	DINAS TENAGA KERJA	200 Mbps
19	DINAS SOSIAL	200 Mbps
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	200 Mbps
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	200 Mbps
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	200 Mbps
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	200 Mbps
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	200 Mbps
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	200 Mbps
26	DINAS KESEHATAN	200 Mbps
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	200 Mbps
28	INSPEKTORAT	200 Mbps
29	KECAMATAN JOMBANG	40 Mbps
30	KECAMATAN TEMBELANG	40 Mbps
31	KECAMATAN PLANDAAN	40 Mbps
32	KECAMATAN PLOSO	40 Mbps
33	KECAMATAN KABUH	40 Mbps
34	KECAMATAN KUDU	40 Mbps
35	KECAMATAN NGUSIKAN	40 Mbps
36	KECAMATAN KESAMBEN	40 Mbps
37	KECAMATAN PETERONGAN	40 Mbps
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	40 Mbps
39	KECAMATAN SUMOBITO	40 Mbps
40	KECAMATAN MOJOWARNO	40 Mbps
41	KECAMATAN BARENG	40 Mbps
42	KECAMATAN WONOSALAM	40 Mbps
43	KECAMATAN NGORO	40 Mbps
44	KECAMATAN GUDO	40 Mbps

45	KECAMATAN PERAK	40 Mbps
46	KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo	40 Mbps

NO	PERANGKAT DAERAH	BANDWITH (FIBER OPTIC 100 Mbps) dan (BACKUP BROADBAND 100bps)
47	KECAMATAN MEGALUH	40 Mbps
48	KECAMATAN DIWEK	40 Mbps
49	KECAMATAN JOGOROTO	40 Mbps
50	SEKRETARIAT DAERAH	40 Mbps
51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	40 Mbps
52	RSUD JOMBANG	40 Mbps
53	RSUD PLOSO	40 Mbps
Total		2000Mbps/2 Gb

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 1 dokumen dan realisasi 100% yaitu 1 dokumen pelaksanaan sub domain yang sesuai dengan standart.

Indikator ini mengacu pada Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara bahwa domain utama di Pemerintahan Kabupaten Jombang yaitu jombangkab.go.id, sedangkan subdomain yaitu namaaplikasi/opd.jombangkab.go.id. Target 100% merupakan Penetapan Sub Domain Website Pemerintah Kabupaten Jombang dan nama email resmi dengan domain jombang.kab.go.id, maka bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang akan membuat/membangun website atau aplikasi sistem informasi berbasis web dapat mengajukan permohonan subdomain sekaligus hosting dan email resmi kepada Dinas KOMINFO Kabupaten Jombang sesuai dengan regulasi Perbup Jombang No 15 Tahun 2021 Tentang SPBE dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Nomor : 188/188/415.23/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang.

**REKAPITULASI DATA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG
YANG MEMILIKI PORTAL DAN SITUS WEB SESUAI STANDART
TAHUN 2024**

NO	PERANGKAT DAERAH	PLATFORM	NAMA WEB SESUAI STANDART
1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	WEBSITE	bkpsdm.jombangkab.go.id
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	WEBSITE	bapenda.jombangkab.go.id
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	WEBSITE	bpkad.jombangkab.go.id
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	WEBSITE	bappeda.jombangkab.go.id
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	WEBSITE	bpbd.jombangkab.go.id
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	WEBSITE	bakesbangpol.jombangkab.go.id
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	WEBSITE	dpmptsp.jombangkab.go.id
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	WEBSITE	kominfo.jombangkab.go.id
9	DINAS PERHUBUNGAN	WEBSITE	dishub.jombangkab.go.id
10	DINAS PERTANIAN	WEBSITE	pertanian.jombangkab.go.id
11	DINAS PETERNAKAN	WEBSITE	peternakan.jombangkab.go.id
12	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	WEBSITE	dkpp.jombangkab.go.id
13	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	WEBSITE	disdagrin.jombangkab.go.id
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	WEBSITE	dinkopum.jombangkab.go.id
15	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	WEBSITE	disporapar.jombangkab.go.id
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	WEBSITE	dikbud.jombangkab.go.id
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	WEBSITE	dpmpd.jombangkab.go.id
18	DINAS TENAGA KERJA	WEBSITE	disnaker.jombangkab.go.id
19	DINAS SOSIAL	WEBSITE	dinsos.jombangkab.go.id
20	DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	WEBSITE	pupr.jombangkab.go.id
21	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	WEBSITE	perkim.jombangkab.go.id
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	WEBSITE	dlh.jombangkab.go.id
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	WEBSITE	dispersip.jombangkab.go.id

24		WEBSITE	dppkb-pppa.jombangkab.go.id
----	--	---------	--

	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK		
25	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	WEBSITE	dukcapil.jombangkab.go.id
26	DINAS KESEHATAN	WEBSITE	dinkes.jombangkab.go.id
27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	WEBSITE	satpolpp.jombangkab.go.id
28	INSPEKTORAT	WEBSITE	inspektorat.jombangkab.go.id
29	KECAMATAN JOMBANG	WEBSITE	jombang.jombangkab.go.id
30	KECAMATAN TEMBELANG	WEBSITE	tembelang.jombangkab.go.id
31	KECAMATAN PLANDAAN	WEBSITE	plandaan.jombangkab.go.id
32	KECAMATAN PLOSO	WEBSITE	ploso.jombangkab.go.id
33	KECAMATAN KABUH	WEBSITE	kabuh.jombangkab.go.id
34	KECAMATAN KUDU	WEBSITE	kudu.jombangkab.go.id
35	KECAMATAN NGUSIKAN	WEBSITE	ngusikan.jombangkab.go.id
36	KECAMATAN KESAMBEN	WEBSITE	kesamben.jombangkab.go.id
37	KECAMATAN PETERONGAN	WEBSITE	peterongan.jombangkab.go.id
38	KECAMATAN MOJOAGUNG	WEBSITE	mojoagung.jombangkab.go.id
39	KECAMATAN SUMOBITO	WEBSITE	sumobito.jombangkab.go.id
40	KECAMATAN MOJOWARNO	WEBSITE	mojowarno.jombangkab.go.id
41	KECAMATAN BARENG	WEBSITE	bareng.jombangkab.go.id
42	KECAMATAN WONOSALAM	WEBSITE	wonosalam.jombangkab.go.id
43	KECAMATAN NGORO	WEBSITE	ngoro.jombangkab.go.id
44	KECAMATAN GUDO	WEBSITE	gudo.jombangkab.go.id
45	KECAMATAN PERAK	WEBSITE	perak.jombangkab.go.id
46	KECAMATAN BANDAR KEDUNG MULYO	WEBSITE	bandarkedungmulyo.jombangkab .go.id
47	KECAMATAN MEGALUH	WEBSITE	megaluh.jombangkab.go.id
48	KECAMATAN DIWEK	WEBSITE	diwek.jombangkab.go.id
49	KECAMATAN JOGOROTO	WEBSITE	jogoroto.jombangkab.go.id
50	SEKRETARIAT DAERAH	WEBSITE	setda.jombangkab.go.id
51	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	WEBSITE	dprd.jombangkab.go.id
52	RSUD JOMBANG	WEBSITE	rsudjombang.jombangkab.go.id
53	RSUD PLOSO	WEBSITE	rsudploso.jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yaitu target 1 sistem dan Realisasi 1 sistem yaitu 100%.

Penerapan Sistem Informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Jombang membutuhkan kecepatan dalam pengelolaan data dan informasi melalui infrastruktur teknologi informasi melalui koneksi jaringan intra pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Kondisi eksisting jaringan intra fiber optic yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu ada di antar OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang, lokasi – lokasi penempatan CCTV di lokasi strategis dan lokasi – lokasi wifi gratis sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan di Kabupaten Jombang yang memiliki sistem jaringan internet fiber optic.

LAPORAN PENYEDIAAN JARINGAN INTERNET

NO	PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA	LAYANAN	BANDWITH		KET	NO LAYANAN (SID)	
I	1	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	IP TRANSIT	2	GBPS	AO	1727080421
	TOTAL IP TRANSIT						
II	1	TAMAN KEBON RATU	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1917048479
	2	TAMAN INFORMASI	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916900489
	3	TAMAN KEBON ROJO	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916976081
	4	PLAYGROUD ALONALON	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1916433593
	5	TAMAN DEPAN CAPIL	WIFI MANAGE SERVICE (WMS)	100	MBPS	AO	1917292090
TOTAL WMS							
III	1	DISDIKBUD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212829
	2	DINKES	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212834
	3	DINAS PUPR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212822
	4	DINAS PERKIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212823
	5	SATPOL PP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212520
	6	BPBD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318284598
	7	DINSOS	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212133
	8	DISNAKER	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212809
	9	DKPP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212826
	10	DLH	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212138
	11	DISDUKCAPIL	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212810
	12	DPMD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212831
	13	DPPKB-PPPA (KANTOR PUSAT)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212837
	14	DISHUB	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212541
	15	DISKOMINFO (SJFM)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318212811
	16	DINKOPUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212765
	17	DPMPSTSP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212838
	18	DISPORAPAR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212844
	19	DISPERSIP (PERPUSTAKAAN MASTRIP)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212835
	20	DISPERSIP (BIDANG ARSIP)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212813
	21	DISPERTA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212827
	22	DISNAK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212828
	23	DISDAGRIN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212814

24	SEKRETARIAT DPRD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212815
25	BAPPEDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212816
26	BPKAD	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212817

27	BAPENDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212818
28	BKPSDM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212820
29	INSPEKTORAT	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212846
30	BAKESBANGPOL	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212848
31	KELURAHAN JELAKOMBO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212534
32	KELURAHAN JOMBATAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212851
33	KELURAHAN KALIWUNGU	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212852
34	KELURAHAN KEPANJEN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212853
35	PENDOPO KABUPATEN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212542
36	PENDOPO KABUPATEN (KANTOR SEKPR	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212855
37	ALUN-ALUN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212856
38	LAPANGAN PEMKAB/MASJID	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318212821
39	PASAR PERAK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249821
40	BAGIAN UMUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249040
41	BAGIAN KESRA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318243888
42	BAGIAN PEMBANGUNAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318242167
43	BAGIAN ORGANISASI	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248607
44	BAGIAN PEMERINTAHAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249304
45	BAGIAN PROKOPIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249306
46	BAGIAN PBJ	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249307
47	BAGIAN HUKUM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248606
48	BAGIAN PEREKONOMIAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249308
49	BAGIAN RENKEU	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248610
50	KODIM	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318287441
51	PN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318282829
52	KEJAKSAAN	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318284116
53	LAPAS	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	MO	152318281941
54	SEKPRI WABUP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249291
55	SEKPRI SEKDA	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249656
56	SEKPRI BUPATI	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249469
57	ASISTEN	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249470
58	DISHUB (UJI KIR)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249284
59	DISHUB (PJU)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249460
60	PMK PLOSO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152333210521
61	PMK MOJOAGUNG	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152319217006
62	PMK NGORO	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152322202265
63	UPT METROLOGI (PETERONGAN)	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248104
64	PKK	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249826
65	SWAGATA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249827
66	RUMAH DINAS BUPATI	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249829
67	RUMAH DINAS WABUP	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318248959
68	RUMAH DINAS SEKDA	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249831
69	UPT LAB DLH	HSI (INDIBIZ)	100	MBPS	AO	152318249832
70	DISKOMINFO (KANTOR PUSAT)	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318212832
71	JCC	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	MO	152318285578
72	R. RAPAT BUNG TOMO	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318240195
73	R. RAPAT SOERO	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318248556

74	R. RAPAT AULA BESUT	HSI (INDIBIZ)	200	MBPS	AO	152318249467
75	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	NETMONK PRIME	1	DEVICE	AO	

1	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ACCESS POINT RUIJIE RG-AP720-L	75	UNIT	AO	
2	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ACCESS POINT RUIJIE RG-AP820-L	5	UNIT	AO	
3	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MIKROBIT SFP+ 10G LH SM 10KM 1310NM	1	UNIT	AO	
4	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MIKROTIK ROUTER CCR2116-12G-4S+	1	UNIT	AO	
5	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	ENGINEER ON SITE	1	ORANG	AO	
6	PEMKAB JOMBANG / KOMINFO	MAINTENANCE FIBER OPTIK	1	PAKET	AO	

- **Kegiatan 2 pada Program Aplikasi Informatika yaitu Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi target 2 aplikasi dan realisasi 2 aplikasi.**

Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota target 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen. Target 2 dokumen yaitu 1 dokumen penatalaksanaan dan pengawasan dokumen yaitu realisasi Dokumen SPBE tentang SPLP & Pusat dan Jaringan Intra.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola target 1 unit dengan realisasi 1 unit yaitu 100%.

Indikator ini merupakan standarisasi yang diberlakukan oleh Permen Komdigi terkait standar pusat data yang harus diterapkan pada lingkungan Pemerintah Daerah. Terdapat satu pusat data di Kabupaten Jombang yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Realisasi pemenuhan pusat data sesuai dengan target yaitu 77 indikator standarisasi yang diterapkan oleh Kementerian Komdigi.

Standarisasi Pusat Data Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
1	Pusat data aman dari bencana, mudah diakses dan mudah melakukan pengembangan/pembangunan		√	

2	Perancangan dan pembangunan pusat data sesuai dengan standar topologi yang dipilih sesuai kebutuhan	√		
3	Penyediaan jalur supply utility dan logistik	√		

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
4	Penyediaan bandwidth untuk komunikasi yang diperlukan dan memiliki jalur alternatif guna menghindari kepadatan lintas data serta mencegah kegagalan satu jalur	√		
5	Penyediaan sistem monitoring lingkungan pusat (temperatur, kelembapan, asap, kebakaran, kebocoran air, dan tegangan listrik)	√		
6	Mempunyai dan menjalankan standar operasional prosedur untuk operasi dan perawatan	√		
7	Memiliki rencana keberlangsungan usaha dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif serta proses pemulihan bencana yang cepat dan adaptif		√	
8	Ruang masuk yang dipakai sebagai antar-muka antara sistem pengkabelan pusat data dan pengkabelan antar bangunan	√		
9	Lokasi untuk perangkat penyedia akses dan titik demarkai dan juga antar muka dengan sistem pengkabelan	√		
10	Area distribusi utama (lokasi main cross connect, router inti dan switches untuk infrastruktur LAN dan SAN)	√		
11	Area distribusi horizontal (lokasi distribusi untuk pengkabelan ke area distribusi perangkat)	√		
12	Area distribusi perangkat (ruang yang dialokasikan untuk perangkat akhir termasuk sistem komputer dan perangkat telekomunikasi)	√		
13	Area distribusi zona (terletak antara area distribusi horizontal dan area distribusi perangkat)	√		
14	Lokasi bangunan berada pada lokasi yang aman bencana alam dan mempunyai akses jalan yang cukup dan fasilitas parkir	√		
15	Bangunan ruang komputer tidak berada di bawah area perpipaan kecuali memiliki sistem pengendali air	√		
16	Jendela ruang komputer yang menghadap ke sinar matahari ditutup	√		
17	Memiliki area bongkar muat yang memadai untuk menangani penghantaran barang/peralatan	√		
18	Memiliki sistem pengkondisian udara, proteksi kebakaran, kelistrikan yang sama dengan standar ruang komputer		√	
19	Kontrol akses memiliki pengamanan fisik disetiap jendela yang memungkinkan akses langsung ke pusat data	√		
20	Setiap sumber daya manusia di pusat data memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup terhadap keamanan fisik pusat data	√		
21	Pengamanan pusat data selama 24 jam dengan jumlah petugas paling sedikit 2 orang per shift		√	
22	Terdapat perangkat sistem pemantau visual yang berfungsi untuk memantau dan merekam	√		
23	Menggunakan sistem akses elektronik dan sistem pengawasan yang dikendalikan dengan mekanisme otentikasi	√		
24	Setiap tamu/pengunjung memiliki izin dan dilengkapi dengan tanda masuk serta tanda penhenal untuk dapat masuk		√	
25	Jumlah dan lokasi pintu darurat kebakaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	√		
26	Pintu darurat kebakaran harus dapat dibuka kearah luar	√		

27	Lampu darurat dan tanda keluar diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	
28	Lampu darurat, tanda keluar darurat, dan titik kumpul darurat diletakkan pada lokasi sesuai ketentuan		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
29	Dinding dan pintu ke ruang komputer, ruang mekanikal dan kelistrikan, ruang telekomunikasi dan kawasan kritikal lainnya memiliki tingkat terbakar (fire-rating) sesuai dengan peraturan		√	
30	Ruang komputer diproteksi dengan sistem pemadam kebakaran dan deteksi asap		√	
31	Seluruh sistem deteksi asap bangunan diintegrasikan ke satu alarm bersama		√	
32	Sistem pemadam kebakaran otomatis diaktifkan secara manua		√	
33	Tersedia catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman untuk keperluan pemeriksaan		√	
34	Tersedia bukti pelatihan staf pada simulasi pengendalian kebakaran		√	
35	Pemadam kebakaran ditempatkan sesuai ketentuan peraturan		√	
36	Semua tanda peringatan kebakaran ditempatkan pada posisinya sesuai ketentuan peraturan		√	
37	Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran didesain dan dipasang oleh petugas yang memiliki kualifikasi dan didesain sesuai standar internasional/nasional atau regulasi nasional		√	
38	Bangunan dilengkapi dengan sistem proteksi petir		√	
39	Kabel daya masuk ke dalam bangunan dan diterminasi di ruang penyambungan listrik yang andal yang berisikan seluruh penyambungan dan pengukuran yang penting		√	
40	Daya yang tersedia dari penyedia listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak dimana pusat data berada		√	
41	Tersedia catu daya listrik alternatif (seperti generator) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional pusat data paling sedikit 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama		√	
42	Perangkat pusat data harus diproteksi dengan UPS atau catu daya cadangan lainnya		√	
43	Kapasitas penyimpanan energi UPS atau catu daya cadangan lainnya memadai untuk memasok beban pusat data sehingga cukup waktu bagi catu daya alternatif mencapai keadaan tunak (steady state) untuk memikul beban pusat data		√	
44	Kapasitas UPS lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat pusat data. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS		√	
45	UPS memiliki sistem pelaporan dan pemantauan kinerja serta sistem peringatan		√	
46	Ruang pusat data memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga kurang dari 1 Ohm	√		
47	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan temperatur dengan suhu antara 18-24 °C	√		
48	Ruang komputer dijaga dan dikendalikan kelembaban ruangnya dengan kelembaban antara 50-55%	√		
49	Peralatan pengkondisian udara dihubungkan ke catu daya utama dan didukung oleh catu daya alternatif		√	
50	Seluruh pengkabelan interior dengan tipe tidak mudah terbakar		√	

51	Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak	√		
----	---	---	--	--

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
52	Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20 (dua puluh) cm	√		
53	Kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60 (enam puluh) cm	√		
54	Kabel yang melewati dinding dilindungi terhadap bahaya api sesuai ketentuan peraturan		√	
55	Kabel tidak diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak		√	
56	Setiap kabel memiliki label identifikasi yang unik pada kedua ujung awal dan akhir		√	
57	Setiap rak peralatan memiliki label identifikasi		√	
58	Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri		√	
59	Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang komputer		√	
60	Memiliki komponen kapasitas dasar dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
61	Memiliki tingkat availability 99,671%		√	
62	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 28,8 jam pertahun		√	
63	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sesuai kebutuhan		√	
64	Memiliki tingkat availability 99,749%		√	
65	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 22 jam pertahun		√	
66	Memiliki komponen kapasitas redundan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Satu jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif dan satu jalur distribusi lainnya dalam kondisi siaga (standby).		√	
67	Memiliki kemampuan untuk mendeteksi kegagalan, mengisolasi dampak kegagalan dan melakukan perawatan sehingga layanan pusat data tetap bekerja dengan baik		√	
68	Memiliki tingkat availability 99,982%		√	
69	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 1,6 jam pertahun		√	
70	Memiliki komponen kapasitas redundan dan jalur distribusi daya listrik dan sistem pendinginan yang mensuplai peralatan komputer sedemikian hingga pemeliharaan maupun perbaikan dapat dilakukan di setiap komponen kritikal pusat data tanpa harus mematikan operasi pusat data. Kedua jalur distribusi tersebut dalam kondisi aktif.		√	
71	Memiliki tingkat availability 99.995%		√	
72	Waktu layanan tidak tersedia pertahun paling banyak 2.4 menit pertahun.		√	
73	Memastikan power management berjalan dengan baik		√	
74	Memastikan desain dan manajemen aliran udara dan sistem pendingin berjalan dengan baik		√	

NO	URAIAN	KONDISI		
		MEMENUHI	KURANG	TIDAK
75	Memastikan peralatan mekanik dan elektrik bekerja pada rentang optimum operasi baik dalam hal rentang daya dan rentang temperatur		√	
76	Menggunakan peralatan TIK dan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan power density Pusat Data, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan pengembangan Pusat Data ke depannya		√	
77	Mengintegrasikan kontrol optimasi manajemen energi pada seluruh peralatan TIK dan keseluruhan fasilitas Pusat Data		√	

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan audit ISO 27001:2002 terkait standar keamanan pada pusat data yang ada pada Dinas Kominfo dengan hasil sebagai berikut :

1. Selama proses audit, beberapa auditee belum memahami pemetaan dokumen dan dokumen yang digunakan dalam ruang lingkup proses terkait, hal ini terlihat dari kekurangan auditee terhadap dokumen yang harus disiapkan.
2. Kegiatan korektif auditee akan ditinjau oleh auditor dan dipantau oleh manajemen puncak selama tinjauan manajemen berikutnya.
3. Tim SMKI harus disesuaikan dengan tupoksi per orang sebagai contoh yang melakukan pekerjaan SMKI hanya sebagian orang;
4. Melakukan sosialisasi kebijakan terhadap semua OPD terkait keamanan informasi;
5. Membuat perjanjian terkait keamanan informasi dengan vendor atau penyedia eksternal;
6. Melakukan pendataan aset di pusat data;
7. Pengadaan CCTV di ruang server untuk monitoring aset penting di Pusat Data;
8. Hak Akses Istimewa perlu dibatasi, sehingga super admin tidak memiliki 100% akses terhadap sistem;
9. Perlu adanya pengadaan fasilitas Disaster Recovery Center;
10. Melakukan konfigurasi terkait pembatasan penggunaan USB di setiap perangkat yang berhubungan dengan proses bisnis;
11. Melakukan pencatatan terkait log aktivitas dan review log akses;
12. Melakukan pencatatan terkait serangan siber di form rekap untuk membuat lesson learned;
13. Memastikan kesesuaian jenis APAR yang digunakan di Pusat Data serta tanggal kadaluarsanya;
14. Pemetaan kontrol akses fisik, informasi, dan virtual;

15. Pengadaan infografis terkait akses fisik seperti pengadaan infografis dilarang merokok, makan, minum, dan melakukan aktivitas pengambilan gambar di zona terbatas

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan target 2 unit dengan realisasi 100% yaitu aplikasi Jombang Stop Stunting pada stunting.jombangkab.go.id dan pengembangan pada website jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan indikator Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 2 layanan berupa realisasi aplikasi JDIH pada portal API dan integrasi layanan SSO dengan monev.jombangkab.go.id dan e-office.jombangkab.go.id

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan indikator Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City target 1 dokumen dengan realisasi 1 dokumen rencana pengembangan call center dan penyelenggaraan operasional pemeliharaan call center 112.

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah target 1 dokumen berupa kegiatan Fasilitas Relawan TIK. Relawan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Jombang telah dilaksanakan pelantikan pada tanggal 21 Februari 2025 yang bertugas untuk menjalankan program-program edukasi, sosialisasi, dan pengembangan keterampilan TIK untuk masyarakat, termasuk pelatihan literasi digital, pendampingan UMKM dalam transformasi digital, serta kampanye edukasi terkait keamanan data dan etika bermedia sosial.

Sasaran Strategis ke-1 pada Indikator ke-4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan target 2.2 dan realisasi 2.26 dengan capaian 102,6%.

Kegiatan Statistik Sektoral meliputi penilaian Kegiatan :

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Jombang adalah:

a. Survei Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Tahun 2023

b. Survei Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH), Tahun

2023 Dengan hasil sebagai berikut :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,17
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	1,96
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,78
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,26

Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek (1)	Bobot ¹ (2)	Nilai Indeks (3)
Domain Prinsip SDI		
Standar Data Statistik	25%	1,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	3,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	2,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	2,00
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	3,00
Pengumpulan Data	26%	1,00
Pemeriksaan Data	21%	1,50
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	2,00
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	1,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,75
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	3,00
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	3,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	2,32

Catatan: ¹ Bobot aspek pembentuk indeks domain

Hasil pada penilaian perindikator sebagai berikut :

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

- Penerapan Aspek Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah mencapai predikat baik.
- Penerapan Aspek Metadata Statistik, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor 500.14.1/1857/415.23/2023 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan statistik sektoral sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri. Penerapan interoperabilitas data dilakukan oleh seluruh produsen data terkait. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu, melalui portal open data yang sudah dilengkapi dengan web service.

2. Domain Kualitas Data

- Pemerintah Kabupaten Jombang belum memiliki keunggulan pada domain terkait karena seluruh aspek belum mencapai predikat baik dan dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.

3. Domain Proses Bisnis Statistik Keunggulan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data dan Aspek Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Jombang sudah berada pada predikat baik. Sudah ada standar yang mengatur tata cara perencanaan dan penyebarluasan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
- Penerapan Aspek Perencanaan Data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan SOP No. 188/47/415.42/2023 tentang Perencanaan Data Prioritas Kabupaten Jombang. Penerapan Aspek Perencanaan Data terkait proses desain statistik dan penyiapan instrumen sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan Surat Edaran Nomor 500.14.1/187/415.23/2023 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Surat Edaran tersebut disertai dengan pedoman tata laksana

penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Jombang yang mencakup proses desain statistik.

- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah dilakukan oleh walidata sesuai dengan SK Bupati Jombang Nomor 188.4.45/211/415.10.1.3/2023

tentang Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Jombang dan SK Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor 188/0158/415.23/2023 tentang Tim Walidata Pendukung Teknis SDI Kabupaten Jombang di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Walidata bersama seluruh produsen data Kabupaten Jombang telah menerapkan manajemen rilis produk statistik ke pengguna, mulai dari penyusunan hingga penyebarluasan produk statistik melalui portal Satu Data Kabupaten Jombang (Sambang).

4. Domain Kelembagaan Keunggulan:

Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik, Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata telah dilaksanakan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten Jombang, melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut.

5. Domain Statistik Nasional

Penerapan Statistik Nasional di Kabupaten Jombang sudah baik. Sudah ada rencana aksi Satu Data Indonesia yang disusun dan portal satu data (SAMBANG) yang telah dilakukan satu pintu oleh walidata.

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan indikator Persentase Data Sektoral yang telah dipublikasikan dengan target 100% telah terealisasi 100%. Seluruh data telah dipublikasikan pada portal sambang.jombangkab.go.id meliputi 9529 data, 33 urusan, 63 produsen dan 33 publikasi

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data yaitu 28 data sektoral telah tercapai 100% meliputi :

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
1	Geografi	Studi tentang lokasi, bentuk, dan karakteristik fisik suatu wilayah, termasuk analisis sumber daya dan kondisi alam.	2019-2024
2	Demografi	Analisis data penduduk terkait jumlah, distribusi, kepadatan, serta komposisi usia dan jenis kelamin.	2019-2024

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
3	Perekonomian Daerah	Kajian mengenai kondisi ekonomi di suatu wilayah, mencakup tingkat pendapatan, lapangan kerja, dan sektor produktif.	2019-2024
4	Keuangan Daerah	Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan untuk pembangunan.	2019-2024
5	Pendidikan	Usaha peningkatan akses dan mutu pendidikan melalui fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum yang sesuai.	2019-2024
6	Kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan yang mencakup fasilitas, tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat.	2019-2024
7	PUPR	Pengelolaan pembangunan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, serta tata ruang kota dan wilayah.	2019-2024
8	Perumahan dan Permukiman	Penyediaan hunian yang layak dan pengaturan kawasan permukiman agar lebih tertata dan nyaman.	2019-2024
9	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penjagaankeamanan, ketertiban umum, dan perlindungan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.	2019-2024
10	Tenaga Kerja	Pengembangan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja serta perlindungan hak-hak pekerja tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja	2019-2024
11	Pemberdayaan Perempuan	Upaya peningkatan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.	2019-2024

12	Perlindungan Anak	Pemberian perlindungan terhadap anak dari kekerasan serta pemenuhan hak-hak dasar mereka.	2019-2024
----	-------------------	---	-----------

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
13	Pangan	Usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi masyarakat.	2019-2024
14	Pertanahan	Pengelolaan tanah untuk keperluan pembangunan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan secara teratur.	2019-2024
15	Lingkungan Hidup	Perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian alam untuk mencegah kerusakan atau polusi.	2019-2024
16	Administrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil	Pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil seperti kelahiran, kematian, dan status kependudukan.	2019-2024
17	Pemberdayaan Masyarakat	Program peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.	2019-2024
18	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup.	2019-2024
19	Perhubungan	Pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur transportasi serta pelayanan publik di bidang transportasi.	2019-2024
20	Komunikasi dan Informatika	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk Mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi.	2019-2024
21	Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah	Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan ekonomi lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat.	2019-2024
22	Penanaman Modal	Pengelolaan investasi dari dalam dan luar negeri untuk mendukung Pertumbuhan ekonomi daerah.	2019-2024

23	Kepemudaan dan Olahraga	Pengembangan potensi pemuda dan olahraga untuk meningkatkan kesehatan, prestasi, dan kreativitas.	2019-2024
24	Kebudayaan	Pelestarian dan pengembangan	2019-2024

No	Nama Variabel	Definisi	Referensi Waktu
		warisan budaya serta peningkatan kesadaran budaya masyarakat.	
25	Perpustakaan dan Kearsipan	Pengelolaan perpustakaan dan arsip untuk penyimpanan informasi dan sejarah serta mendukung pendidikan.	2019-2024
26	Pariwisata	Pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi pada ekonomi lokal.	2019-2024
27	Pertanian	Pengelolaan sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.	2019-2024
28	Kehutanan	Pelestarian dan pengelolaan sumber daya hutan untuk mendukung lingkungan yang berkelanjutan.	2019-2024
29	Perdagangan	Pengaturan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang.	2019-2024
30	Perindustrian	Pengembangan sektor industri untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.	2019-2024
31	Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan untuk keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan.	2019-2024
32	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi kerja.	2019-2024

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan target 2 dokumen meliputi : Dokumen Penyusunan Infografis Data Statistik Sektoral sesuai dengan 28 data sektoral dan Indeks Kematangan TIK dan I-PIKP.

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan indikator Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dan target 1 dokumen. Kegiatan

metadadata berupa Sosialisasi dan Pendampingan Penginputan Metadata Indikator dan Metadata Variabel pada Aplikasi <https://indah.bps.go.id>. Sebagai wujud pelaksanaan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Badan Pusat Statistik memberikan perhatian penuh dengan membangun aplikasi INDAH (Indonesia Data Hub). Aplikasi tersebut merupakan sebuah sistem statistik terintegrasi yang diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas kegiatan statistik. Platform tersebut menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk system lain. Aplikasi INDAH dibangun sebagai data solution platform yang menerapkan prinsip-prinsip SDI.

Pengumpulan metadata ini merupakan bagian dari implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah. Metadata adalah informasi yang terstruktur dan terstandar untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan data. Melalui aplikasi INDAH BPS (indah.bps.go.id), pengumpulan metadata dilakukan secara langsung dengan fokus pada Data Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan perangkat daerah dapat menyediakan data secara rutin dan akurat setiap tahun. Metadata yang dikumpulkan akan membantu dalam meningkatkan kualitas tata kelola data dan informasi, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dengan indikator Jumlah Infrastruktur Statistik dengan target 1 unit.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan indikator Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun dan target 1 dokumen. Kegiatan Forum Satu Data Indonesia dalam rangka monitoring kegiatan satu data yang dilaksanakan setiap tribulan.

Sasaran Strategis ke 1 pada indikator ke -5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dengan target 290 dan realisasi 612.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui Indeks KAMI versi 5.0 tahun 2024 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang yang disesuaikan dengan pertanyaan Indeks KAMI dan data pengukuran Indeks KAMI didapatkan hasil pengukuran seperti Gambar 4.1 sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik. Ketergantungan yang tinggi tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.1 dengan skor kategori sistem elektronik mencapai skor 20. Berdasarkan hasil penilaian sistem elektronik yang didapatkan, maka yang akan digunakan dalam Indeks KAMI untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah kategori tinggi. Hasil evaluasi akhir yang didapatkan adalah pemenuhan kerangka kerja dasar (Gambar 4.1), hasil tersebut menjadi gambaran terkait kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Hasil evaluasi akhir yang didapatkan sesuai dengan Gambar 4.1 adalah dengan nilai 612 dan apabila dilihat pada Gambar 4.1 terdapat grafik batang yang menunjukkan kondisi keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berada di level warna kuning.

Keterangan	Responden	Skor Maksimal	Persentase
Tata Kelola	98	126	78%
Pengelolaan Risiko	43	72	60%
Kerangka Kerja	140	192	73%
Pengelolaan Aset	157	258	61%
Teknologi	128	186	69%
PDP	46	84	55%

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Indikator Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik.

Indikator pada program ini merupakan sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik dengan target 50% dan realisasi 50% dengan capaian 100%.

- **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan informasi dengan target 53 perangkat daerah, realisasi 53 perangkat daerah dengan capaian 100%.**

Sertifikat elektronik pada sistem elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik melalui tanda tangan elektronik yang didaftarkan pada BSSN (Badan Sandi Siber Negara). Rencana kerja yang telah terlaksana pada indikator ini adalah :

- Mengkoordinasikan pendaftaran sertifikat elektronik pada seluruh perangkat daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu bentuk pengamanan informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang adalah melalui sertifikat elektronik (tanda tangan elektronik tersertifikasi/TTE) pada dokumen yang dihasilkan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam rangka meningkatkan keamanan informasi pada dokumen Pemerintah Kabupaten Jombang serta mendukung penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Jombang, maka bulan Nopember 2022 ditetapkan penggunaan aplikasi Srikandi yang dilengkapi dengan TTE untuk seluruh dokumen administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang. Tahun 2023 total pengusulan TTE sejumlah 1082 (sertifikat BSrE) Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah serta Kepala UPT. Untuk mendukung layanan TTE telah diwujudkan inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diberi nama SATSET (Sistem Layanan Terintegrasi Sertifikat Elektronik). Pemohon dan Pengguna TTE dapat mendapatkan layanan pengusulan, pembaharuan, pencabutan, perpanjangan dan pengaduan secara online dengan aplikasi SATSET, sehingga proses pelayanan tidak terbatas ruang dan waktu.
- Melaksanakan Kerjasama penyusunan Assesment Keamanan

Informasi dan mengkoordinasikan pemanfaatan hasil. Untuk mewujudkan sistem elektronik yang aman, maka perlu dilaksanakan

rangkaian pengujian tingkat kemanan pada skala daerah melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) dan pada skala aplikasi melalui penetrasi test. Kegiatan pengujian tersebut melalui Kerjasama dengan pihak ketiga berbentuk assessment keamanan informasi. Proses pengujian melibatkan tim teknis dan perangkat daerah terkait, khususnya pengelola aplikasi strategis. Dari 3 aplikasi strategis layanan Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu :

1. siapasn.jombangkab.go.id (BKPSDM),
 2. bapenda.jombangkab.go.id (Bapenda) dan
 3. e-audit.jombangkab.go.id (Inspektorat).
- Mengkoordinasikan dokumen persandian dari aplikasi SANAPATI. Salah satu bentuk pengamanan informasi dari Pusat sampai dengan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) untuk dokumen administrasi pemerintahan, telah diselenggarakan pengelolaan informasi dari Kementerian/Lembaga Negara yang diinformasikan kepada Kepala Daerah dikirim melalui aplikasi SANAPATI. Seluruh dokumen dari aplikasi Sanapati telah diinformasikan kepada Kepala Daerah secara tepat waktu.
- Target pada kegiatan ini yaitu 100%, pada tahun 2024 realisasi tercapat sesuai dengan target.

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan berupa 1 dokumen penyusunan SK Agen CSIRT

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non elektronik

Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dengan target 1 dokumen dengan realisasi 100% berupa Laporan Penyelenggaraan Persandian berupa pengelolaan berita sanapati.

3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan

keamanan informasi dengan target 53 Perangkat Daerah dengan realisasi 53 perangkat atau capaian 100%. Kegiatan ini juga dilaksanakannya Sosialisasi Agen Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Kabupaten Jombang dan Laporan Penetration Test. Kegiatan rapat pembahasan Penetration Test menggunakan metode black box, dimana tujuan dari metode adalah untuk memberikan penilaian keamanan yang lebih efisien. dengan memiliki sejumlah informasi, penguji dapat menguji sistem keamanan dan mensimulasikan serangan. Dari semua aplikasi di Pemerintah Kabupaten Jombang, terdapat 3 aplikasi yang harus segera dilakukan perbaikan dari sisi keamanan, yaitu

1. siapasn.jombangkab.go.id (BKPSDM),
2. bapenda.jombangkab.go.id (Bapenda) dan
3. e-audit.jombangkab.go.id (Inspektorat).

Pelaksanaan perbaikan akan dilakukan oleh OPD pemilik aplikasi berdasarkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Setelah perbaikan akan dilaksanakan remediasi penetration test pada aplikasi tersebut. Dari kegiatan Assasement Keamanan Teknologi Informasi ini diharapkan tercapainya peningkatan keamanan teknologi informasi di Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Dibawah ini adalah penjabaran pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 2022 dan 2023, diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun 2022 s.d Tahun 2024 (Dua Tahun Terakhir)

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
		Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)	Tahun n-2 (2022)	Tahun n-1 (2023)	Tahun N (2024)
Sasaran Meningkatkan kepuasan masyarakat dibidang Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,50	84,5	n/a	85,81	87,32	n/a
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,53	n/a	3,16	3,45	n/a
Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	61	63	n/a	81,60	66,50	n/a
	Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Komunikasi dan Informatika	83,50	84,5	n/a	85,81	87,32	n/a
Sasaran Program Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	100%	100%	n/a	100%	100%	n/a
	Indeks Pelayanan Publik di bidang Komunikasi dan Informatika	3,51	3,53	n/a	3,16	3,45	n/a
Sasaran Strategis Meningkatkan kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks Kematangan Teknologi Informasi Komunikasi	Level 2	Level 2	n/a	Level 2	Level 3	n/a
Sasaran Program Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola	n/a	8 indikator terkelola	8 indikator terkelola	n/a
Sasaran program Meningkatkan Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik	Persentase sistem elektronik yang berfungsi dengan baik	100%	100%	n/a	100%	100%	n/a

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3		4	5		6	7
1.	Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I- PIKP)	62 (sedang)	63 (sedang)	66 (sedang)	81,60	66,50	67,17
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I- KTIK)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	8 Indikator	2,63 (terkelola)	2,75 (terkelola)	8 Indikator	2,63 (terkelola)	2,75 (terkelola)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	n/a	2,2 (terkelola)	n/a	n/a	2,2
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	n/a	n/a	290 (tinggi)	n/a	n/a	612
		Nilai Evaluasi AKIP PD	79,00	80,00	80,05	80,01	80,13	79,19
	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	n/a	n/a	10%	n/a	n/a	10%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	100%
	Meningkatkatnya Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	n/a	n/a	55%	n/a	n/a	55%
	Meningkatnya rata-rata capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keterangan :

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Program Tahun Tahun 2023, berdasarkan Renstra 2018-2023, Tahun 2024 berdasarkan RPD 2024-2026.

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 merupakan tahun pertama periode RPD periode tahun 2024-2026, Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

NO	Sasaran Strategis /Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra		Realisasi s.d 2024	
			Target	Satuan	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
RPD (2024 -2026)						
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	201	sedang	66	sedang
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	9	Level	3	Level
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	8,57	terkelola	2,75	terkelola
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	7,5	terkelola	2,2	terkelola
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	885	tinggi	290	tinggi
		Nilai Evaluasi AKIP PD	40,30	A	79,19	A
1	Meningkatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan informasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki layanan Informasi	30	%	10%	%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persentase Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik	300	%	100	%
3	Tersedianya data sektoral Kabupaten Jombang	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	300	%	100	%
4	Meningkatkatnya Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	Persentase Sistem Aplikasi Strategis yang berfungsi dengan baik	165	%	50	%
5	Meningkatnya rata-rata capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300	%	100	%

Pada tahun 2024, realisasi terhadap Target RPJMD menunjukkan capaian sebesar 33% dari target tahunan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah 2024–2026, terdapat beberapa indikator yang mendekati target akhir, namun sebagian lainnya masih memerlukan akselerasi. Pada Nilai Evaluasi AKIP PD Tahun 2024 tidak mencapai target dari yang ditargetkan 80,00 dengan realisasi 79,19. Untuk meningkatkan nilai SAKIP ditahun berikutnya maka dibutuhkan langkah-langkah evaluasi yaitu :

1. Melaksanakan Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja;

2. Melaksanakan Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Pegawai

Capaian program PIKP hingga 2024 telah mencapai 32,83% dari target Renstra 2024–2026. Berdasarkan hasil pembahasan, maka terdapat beberapa usulan program bagi peningkatan kinerja PIKP ke depan. Usulan program yang dimaksud untuk tahun depan sebaiknya lebih mengarah dan difokuskan pada perbaikan Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik

Program perbaikan kualitas pelayanan dan komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah konten dan pengikut (follower) serta menggandeng influencer lokal.
- b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online.
- c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (fast response) pada layanan Laporan SP4N. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pengelolaan saran dan pengaduan dengan unit organisasi, unit kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut didukung dengan: (i) penyediaan Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Laporan SP4N; dan atau (ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp.

Capaian program **Indikator 2 yaitu Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IKTIK)** hingga 2024 telah mencapai 33,33% dari target Renstra 2024–2026. Meskipun telah mencapai target namun diperlukan Untuk meningkatkan Indeks

Kematangan TIK , Dinas Kominfo akan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan dalam kajian ini bersifat merinci dari penyusunan strategi prioritas penanganan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yang dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) rekomendasi kebijakan terhadap kematangan tata kelola TIK dari analisis COBIT 2019; dan (ii) rekomendasi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis output TIK dari analisis SKM. Rekomendasi kebijakan dari keduanya adalah sebagai berikut

:

1. Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Kematangan Tata Kelola TIK

Rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja tata kelola TIK pada dasarnya harus mencakup semua domain, baik APO11, APO13, DSS02, dan DSS03. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Monev terhadap manajemen mutu untuk mengidentifikasi cacat kualitas output TIK.
- b. Penyusunan Roadmap penanganan risiko pada software dan layanan informasi.
- c. Penguatan platform seperti LMS (Learning Management System) sebagai forum membuat laporan masalah TI secara tertulis sebagai bahan pemantauan dan evaluasi bertukar informasi untuk pengembangan mutu
- d. Inovasi pengembangan aplikasi dan layanan TIK yang ditekankan pada keragaman dan kualitas fitur website/aplikasi.
- e. Penguatan ruang lingkup serta batasan sistem manajemen keamanan informasi (batasan user).
- f. Meningkatkan penanganan risiko keamanan software dan layanan informasi.
- g. Mengidentifikasi masalah melalui korelasi laporan insiden, log kesalahan, dan sumber identifikasi masalah lainnya.
- h. Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (Service Level Agreements).
- i. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan TIK;
- j. Peningkatan jumlah SDM personil di bidang TIK dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang sesuai Intervensi

masing-masing Perangkat Daerah agar memiliki bagian khusus pengelola TIK

k. Membuat laporan secara berkala dari manajemen perubahan TI tentang kemajuan dalam menyelesaikan masalah

l. Membuat laporan masalah TI secara tertulis sebagai bahan pemantauan dan evaluasi

m. Penguatan politik anggaran pada Diskominfo , khususnya Aptika

n. Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dan Perangkat Daerah dalam lingkup kegiatan layanan mutu TIK

o. Penguatan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam menguatkan output TIK

p. Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui penguatan SOP pelayanan TIK

q. Melakukan penanganan masalah TI secara formal (SOP) serta melakukan audit internal secara berkala menggunakan kerangka kerja yang baku.

2. Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Layanan Publik Berbasis Output TIK

a. Peningkatan kualitas sarana pengaduan online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan.

b. Peningkatan kecepatan tindak lanjut atas pengaduan yang didukung dengan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp dan tindak lanjut pengaduan harus cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.

c. Perbaikan fitur data pelayanan agar mudah ditemukan melalui website atau aplikasi dengan memperhatikan User Interface (UI) dan User Experience (UX).

d. Perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll).

- e. Perbaiki website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (web traffic) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat mengakses website.
 - f. Perbaiki website atau aplikasi memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas layanan.
 - g. Website atau aplikasi menampilkan interactivity seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.
- **Capaian program Indikator 3 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatikahingga 2024 telah mencapai 32,08% dari target Renstra 2024–2026.** Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 3.91 (sangat baik), Namun Dalam 47 indikator tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 mengampu pada 8 indikator terkelola dengan total nilai perindikator 2.75 yang tercapai sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2025 agar Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika meningkat maka dibutuhkan tindak lanjut penyesuaian perubahan kebijakan terkait arsitektur SPBE mengacu pada pasal 1 PP 132/2022 dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada arsitektur SPBE di Kabupaten Jombang.
- **Capaian Indikator 4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terhadap Target Jangka Menengah yaitu 29,33%** Hasil IPS Kabupaten Jombang yaitu 2.2. Hasil IPS pada Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan hasil IPS nasional, maka untuk meningkatkan hasil IPS di Tahun depan, Dinas Kominfo berkoordinasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Jombang untuk melakukan input data secara benar dan valid ke SIPD e-walidata.
- **Capaian Indikator 5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terhadap target jangka menengah yaitu 32,96%** Hasil Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Jombang Hasil Indeks KAMI yaitu 612. Untuk meningkatkan Indeks KAMI berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa;
1. Kontrol SNI ISO/IEC 27001:2022 yang masih perlu pengembangan;

2. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi dan area pengelolaan risiko keamanan informasi;
3. Perlu adanya komitmen terkait penerapan keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

1.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Perbandingan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang disandingkan dengan Level Nasional/Internasional sebagai berikut:

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	66 (sedang)	75,65
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	Level 3	Level 4
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	2,75 Terkelola	3.12
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,2 Terkelola	3.4
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	612	645
		Nilai Evaluasi AKIP PD	80,05 (A)	79,13 (BB)

Analisis Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional:

- **Indikator 1 yaitu Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik I-PIKP**

Hasil I-PIKP Dinas Kominfo yaitu 66 lebih rendah dibandingkan realisasi nasional yaitu 75,65. Untuk meningkatkan I-PIKP ditahun berikutnya Dinas Kominfo akan menindaklanjuti hasil rekomendasi difokuskan pada perbaikan dimensi output dimensi outcome, dengan dukungan dimensi input, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Perbaikan Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi
 - a. Arah dari kegiatan pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah peningkatan frekuensi pengumpulan data dan informasi, dan

peningkatan frekuensi penggunaan hasil riset dari literature review dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi publik.

- b. Arah tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi internal secara mingguan dan bulanan untuk mengumpulkan segala jenis data dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan menyusun informasi publik. Output berupa informasi publik kemudian disampaikan dalam suatu bentuk komunikasi publik. Penugasan pengumpulan data dan informasi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa tema, dimana setiap tema akan menghasilkan satu output informasi publik.
- c. Strategi utama yang diusulkan kajian ini untuk memperbaiki pengelolaan pengumpulan data dan informasi adalah pembuatan dokumen metadata (kompilasi/ inventarisasi) bahan informasi yang beragam dalam merancang informasi dan komunikasi publik. Sebaiknya Bidang HKP membentuk tim kecil atau tim khusus beranggotakan beberapa personil yang salah satu Jobdesk utamanya adalah menyusun dokumen metadata bahan informasi publik.
- d. Pengumpulan data dan informasi berikutnya adalah mengumpulkan pendapat umum yang dapat dilakukan melalui model polling, dengan tahapan:
 - o Mengidentifikasi masalah yang akan dibuat polling
 - o Merumuskan masalah polling
 - o Menyusun instrumen dan menentukan sampel
 - o Melaksanakan pengumpulan data, mengolah dan menganalisa data
 - o Menyusun poin-poin penting pendapat umum yang dijadikan bahan informasi dan untuk menyerap opini serta aspirasi publik.

2. Program Perbaikan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Program perbaikan kualitas pelayanan dan komunikasi publik diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemangku

kepentingan. Hal ini dilakukan dengan penguatan inovasi pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima. Arah tersebut dapat dirinci melalui usulan program peningkatan kualitas pelayanan sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan saluran media sosial khususnya jenis WhatsApp dan Instagram, mengingat keduanya sebagai rujukan utama dari pengakses layanan IKP. Khusus untuk Instagram, optimalisasi dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah konten dan pengikut (follower) serta menggandeng influencer lokal.
- b. Jenis format IKP sebaiknya diperbanyak dengan format video yang mampu menarik perhatian masyarakat dengan beragam segmen umur kelompok sasaran IKP. Hal ini sebagai tindak lanjut dari strategi peningkatan ragam jenis pengemasan komunikasi publik yang lebih menarik, baik offline maupun online.
- c. Peningkatan kualitas sarana pengaduan baik offline maupun online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan. Penekanan program yang mungkin paling mendesak adalah perbaikan kecepatan (fast response) pada layanan Lapor SP4N. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dalam koordinasi pengelolaan saran dan pengaduan dengan unit organisasi, unit kerja, maupun unit pelayanan teknis terkait. Perbaikan tersebut didukung dengan: (i) penyediaan Contact Person khusus pada masing-masing pimpinan unit kerja khususnya Eselon II guna mempercepat penanganan saran dan pengaduan pada Lapor SP4N; dan atau (ii) dukungan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp.
- d. Perbaikan halaman website dan aplikasi agar lebih mudah diakses dengan cara memperbesar bandwidth.

- e. Perbaiki fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll), misal penggunaan infografis yang lebih komunikatif dan penggunaan ilustrasi bagan alur pelayanan publik yang banyak dibutuhkan masyarakat.
 - f. Perbaiki website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (web traffic) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat mengakses website.
 - g. Website atau aplikasi menampilkan interactivity seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat. Mudah dan cepat untuk mendapatkan (download) informasi pada website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang.
 - h. Bahasa website yang dikelola Diskominfo Kabupaten Jombang mudah dipahami.
3. Program Peningkatan Aspirasi Publik
- a. Program ini dapat dilakukan dengan memantau aduan masyarakat dengan tahapan:
 - o Mengumpulkan data aduan masyarakat terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - o Memilah jenis aduan masyarakat
 - o Menganalisis aduan masyarakat
 - o Membuat rekomendasi termasuk isu strategis.
 - b. Program peningkatan aspirasi publik juga termasuk kegiatan untuk melakukan monitoring opini dan aspirasi publik dengan mengevaluasi dan memilih isu publik, dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - o Pada tahap pertama dilakukan analisis hasil monitoring media, hasil pengumpulan pendapat umum dan hasil aduan masyarakat.

- o Tahap kedua membandingkan hasil analisis monitoring media, pengumpulan pendapat dan aduan masyarakat.
- o Tahap ketiga memetakan hasil monitoring untuk menentukan isu prioritas.
- o Tahap keempat adalah menyusun usulan agenda kebijakan dan membuat rekomendasi, termasuk isu strategis.
- o Tahap kelima adalah mendistribusikan hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang telah menjadi isu prioritas kepada Perangkat Daerah terkait.

4. Program Perbaikan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Arah dari kegiatan Monev adalah mengevaluasi kinerja pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan IKP. Kegiatan Monev tidak hanya dilakukan sebatas kegiatan rapat, namun juga harus terdokumentasi dengan baik dalam bentuk Laporan Monev 3 bulanan atau semesteran. Kajian ini mengusulkan bentuk dokumen Laporan Monev Bidang HKP dalam bentuk Policy Brief yang lebih operasional. Policy Brief adalah suatu paper/laporan/tulisan singkat yang muatannya mengarah pada perbaikan pelaksanaan program. Sasaran pembaca dari Policy Brief adalah atasan tertinggi (Kepala Dinas) dan level Kepala Bidang (Kabid).

5. Program Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah

Program ini bertujuan untuk memantau informasi kebijakan daerah berdasarkan agenda prioritas Pemerintah Daerah, dengan teknis tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- b. Memilah informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- c. Mengumpulkan bahan (database) yang berasal dari: (i) regulasi Pemda; (ii) program prioritas Pemda; (iii) informasi kebijakan Pemda; dan (iv) data serta informasi pendukung.

- d. Dapat melibatkan Perangkat Daerah dalam penetapan agenda prioritas Menganalisis informasi kebijakan Pemerintah Daerah
- e. Membuat rekomendasi atas hasil analisis, termasuk informasi kebijakan daerah agar dapat menjadi input dalam menyusun informasi publik berbasis program prioritas daerah.

6. Program penguatan kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui pengelolaan hubungan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik.

Teknis program kegiatan yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan pemetaan komunitas informasi dan komunikasi publik
- b. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan peningkatan literasi informasi.
- c. Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki komunitas informasi dan komunikasi publik.
- d. Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan bagi komunitas informasi dan komunikasi publik yang berprestasi.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh komunitas informasi dan komunikasi publik dalam diseminasi informasi.

- **Indikator 2 yaitu Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK).**

Hasil I-KTIK yaitu pada level 3 lebih rendah dibandingkan dengan level nasional yaitu Level 4. Untuk meningkatkan Indeks Kematangan TIK, Dinas Kominfo akan menindaklanjuti rekomendasi kebijakan dalam kajian ini bersifat merinci dari penyusunan strategi prioritas penanganan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, yang dibagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu: (i) rekomendasi kebijakan terhadap kematangan tata kelola TIK dari analisis COBIT 2019; dan (ii) rekomendasi kebijakan

terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis output TIK dari analisis SKM. Rekomendasi kebijakan dari keduanya adalah sebagai berikut

:

3. Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Kematangan Tata Kelola TIK Rekomendasi kebijakan bagi peningkatan kinerja tata kelola TIK pada dasarnya harus mencakup semua domain, baik APO11, APO13, DSS02, dan DSS03. Rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penguatan Monev terhadap manajemen mutu untuk mengidentifikasi cacat kualitas output TIK.
 - b. Penyusunan Roadmap penanganan risiko pada software dan layanan informasi.
 - c. Penguatan platform seperti LMS (Learning Management System) sebagai forum membuat laporan masalah TI secara tertulis sebagai bahan pemantauan dan evaluasi bertukar informasi untuk pengembangan mutu
 - d. Inovasi pengembangan aplikasi dan layanan TIK yang ditekankan pada keragaman dan kualitas fitur website/aplikasi.
 - e. Penguatan ruang lingkup serta batasan sistem manajemen keamanan informasi (batasan user).
 - f. Meningkatkan penanganan risiko keamanan software dan layanan informasi.
 - g. Mengidentifikasi masalah melalui korelasi laporan insiden, log kesalahan, dan sumber identifikasi masalah lainnya.
 - h. Pembangunan aplikasi yang terkoordinasi dan terdokumentasi dengan baik melalui SLAs (Service Level Agreements).
 - i. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan TIK;
 - j. Peningkatan jumlah SDM personil di bidang TIK dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan yang sesuai Intervensi

masing-masing Perangkat Daerah agar memiliki bagian khusus pengelola TIK

- k. Membuat laporan secara berkala dari manajemen perubahan TI tentang kemajuan dalam menyelesaikan masalah
 - l. Membuat laporan masalah TI secara tertulis sebagai bahan pemantauan dan evaluasi
 - m. Penguatan politik anggaran pada Diskominfo , khususnya Aptika
 - n. Penguatan koordinasi dengan pihak eksternal dan Perangkat Daerah dalam lingkup kegiatan layanan mutu TIK
 - o. Penguatan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam menguatkan output TIK
 - p. Implementasi penerapan prinsip-prinsip pelayanan prima melalui penguatan SOP pelayanan TIK
 - q. Melakukan penanganan masalah TI secara formal (SOP) serta melakukan audit internal secara berkala menggunakan kerangka kerja yang baku.
4. Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Layanan Publik Berbasis Output TIK
- a. Peningkatan kualitas sarana pengaduan online, seperti perbaikan fitur, kecepatan respons, informasi pengaduan yang masuk, jumlah yang sudah diproses, dan solusi yang sudah diberikan.
 - b. Peningkatan kecepatan tindak lanjut atas pengaduan yang didukung dengan layanan tambahan seperti pengaduan berbasis nomor whatsapp dan tindak lanjut pengaduan harus cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik.
 - c. Perbaikan fitur data pelayanan agar mudah ditemukan melalui website atau aplikasi dengan memperhatikan User Interface (UI) dan User Experience (UX).
 - d. Perbaikan fitur website atau aplikasi yang lengkap dan mudah dipahami (tabel, grafik, peta, dll).

- e. Perbaiki website atau aplikasi agar mempunyai sistem navigasi, yaitu petunjuk bagi pengunjung berupa fitur pencarian, link akun resmi media sosial Pemda, statistik pengunjung dan vote pendapat. Hal ini didukung dengan penyediaan statistik pengunjung (web traffic) dan vote pendapat terkait isu-isu tertentu atau pengalaman saat mengakses website.
- f. Perbaiki website atau aplikasi memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan petugas layanan.
- g. Website atau aplikasi menampilkan interactivity seperti fasilitas email, layanan telfon, alamat, dan pengaduan masyarakat.

- **Indikator 3 yaitu : Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika**

Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 3.91 (sangat baik), sedangkan hasil Indeks SPBE Nasional yaitu 3.12 (memuaskan). Hasil Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Jombang lebih tinggi dibandingkan nasional. Namun Dalam 47 indikator tersebut, Dinas Kominfo Kabupaten Jombang pada Tahun 2024 mengampu pada 8 indikator terkelola dengan total nilai perindikator 2.75 yang tercapai sesuai target. Sebagai bahan evaluasi Tahun 2025 agar Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika meningkat maka dibutuhkan tindak lanjut penyesuaian perubahan kebijakan terkait arsitektur SPBE mengacu pada pasal 1 PP 132/2022 dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan OPD terkait perubahan pada arsitektur SPBE di Kabupaten Jombang.

- **Indikator 4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian

penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Hasil IPS Tahun 2024 Nasional yaitu 3.4, sedangkan Hasil IPS Kabupaten Jombang yaitu 2.2. Hasil IPS pada Kabupaten Jombang lebih rendah dibandingkan hasil IPS nasional, maka untuk meningkatkan hasil IPS di Tahun depan, Dinas Kominfo berkoordinasi kepada seluruh OPD di Kabupaten Jombang untuk melakukan input data secara benar dan valid ke SIPD e-walidata.

- **Indikator 5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**

Hasil Indeks KAMI Nasional yaitu 645, sedangkan Pemerintah Kabupaten Jombang Hasil Indeks KAMI yaitu 612. Untuk meningkatkan Indeks KAMI berdasarkan hasil analisis Indeks KAMI yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa;

4. Kontrol SNI ISO/IEC 27001:2022 yang masih perlu pengembangan;
5. Perlu adanya peningkatan terutama di area penilaian perlindungan data pribadi dan area pengelolaan risiko keamanan informasi;
6. Perlu adanya komitmen terkait penerapan keamanan informasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang.

- **Indikator 6 yaitu : Nilai Evaluasi AKIP**

Hasil Nilai Evaluasi AKIP Nasional yaitu 84,97 (A) dan Nilai Evaluasi AKIP Dinas Kominfo yaitu 79,13 lebih rendah dibandingkan nasional. Sebagai bahan evaluasi AKIP di tahun 2024 diperlukan konsisten dan kekelarasan semua dokumen mulai dari Renstra, Renja, PK, SKP, Renaksi sehingga dapat tercapai target kinerja sesuai yang diharapkan. Selain itu monitoring dan evaluasi juga dilakukan secara berkala agar evaluasi AKIP segera ditindaklanjuti jika tidak selaras dan target tidak tercapai.

1.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dengan faktor pendorong sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan daerah dalam pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis;
2. Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah menjangkau seluruh PD;
3. Terjalin relasi yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
4. Aktifnya website dan social media Pemerintah Daerah sebagai penyajian informasi dan release secara berkala;
5. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi dan perangkat TIK harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
6. Komitmen terhadap kebijakan satu data yang dicanangkan secara nasional dan Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik;
7. Koordinasi yang baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara dan Forum Komunikasi Sandi Kabupaten Jombang terkait pembinaan persandian, peningkatan kapasitas Keamanan Informasi dan penerbitan sertifikasi Elektronik.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- a) Keterbatasan anggaran pengembangan sarana prasarana IT dan publikasi kinerja yang memadai;
- b) Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- c) Belum diterapkannya Standart Nasional Manajemen Keamanan Nasional dan kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi.
- d) Belum semua Sistem Informasi dan database terintegrasikan.
- e) Masih sulitnya pemenuhan data sektoral pada OPD

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut

- a) Mengusulkan anggaran prioritas peningkatan sarana dan prasarana TIK dan publikasi;
- b) Mengintegrasikan data dan aplikasi layanan informasi berbasis teknologi informasi.
- c) Koordinasi yang baik dengan lembaga sandi negara sebagai Pembina persandian dan rutin melaksanakan forum komunikasi sandi kepada instansi terkait dengan memberikan informasi akan pentingnya melakukan pengamanan informasi.
- d) Optimalisasi sistem informasi di berbagai sektor layanan, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi harus mendapatkan rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga dapat diintegrasikan dengan sistem informasi terkait;
- e) Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan layanan SPBE dan Smart City

1.2 Realisasi Anggaran

1.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	3	4	5	6		7		8	
	Sasaran Strategis : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Evaluasi AKIP PD	Nilai	80,05	10.842.097.183	98,9	10.364.843.085	98,9	95,6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	10.842.097.183	100	10.364.843.085	100	95.6
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	Persen	100	159.499.000	100	140.569.750	100	88.13
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	118.511.000	3	114.743.750	100	96.82
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.988.000	5	25.826.000	100	63.01

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Persen	100	10.954.733.097	100	6.235.695.953	100	56.92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	10.541.131.097	32	6.023.381.253	100	57.14
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	406.922.000	4	205.912.700	100	50.6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.680.000	1	6.402.000	100	95.84
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	796.953.890	100	544.767.050	100	68.36

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.639.600	12	21.823.500	100	78.96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	149.436.100	12	99.342.300	100	66.48
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	259.954.400	6	126.337.460	100	48.6
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	97.949.140	5	58.351.900	100	59.57
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	25.224.000	3	12.940.000	100	51.3
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	236.750.650	5	225.971.890	100	95.45

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1.474.842.300	100	813.661.623	100	55.17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	761.040.000	12	397.781.185	100	52.27
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	713.802.300	12	415.880.438	100	58.26
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	6.943.888.689	100	5.664.432.269	100	81.57
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	88.150.000	1	45.108.280	100	51.17

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	353.775.110	17	188.408.807	100	53.26
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	405.993.288	2	368.768.259	100	90.83
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	3.868.054.049	63	3.836.967.923	100	99.2
Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik		Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	Nilai	66	3.719.152.891	67,17	3.683.208.621	101,8	99.03
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Persen	10	3.719.152.891	10	3.683.208.621	100	99.03
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen	3.3	5.991.261.741	3.3	4.419.701.785	100	73.77

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	1.361.432.900	3	1.350.284.790	100	99.18
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	2.168.073.301	3	2.154.971.931	100	99.4
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	189.646.690	2	177.951.900	100	93.83
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika	Nilai Indeks	2,75	5.387.174.223	2,75	5.188.533.666	100	96,31
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persen	100	5.387.174.223	100	5.188.533.666	100	96.31
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	Perangkat Daerah	53	3.477.075.840	53	3.272.644.532	100	94.12

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.771.920	1	52.657.236	100	94.42
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	3.365.532.000	1	3.203.915.594	100	95.2
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	2	9.075.444.448	2	2.231.931.390	100	24.59
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	354.271.500	2	349.440.850	100	98.64
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	656.707.000	1	651.915.133	100	99.27

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	470.941.803	2	469.294.853	100	99.65
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	87.500.000	2	65.962.500	100	75.39
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	366.750.000	1	366.322.500	100	99.88
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	29.700.000	1	29.025.000	100	97.73

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai Indeks	2,2	493.534.500	2,26	489.147.909	102,7	99.11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Persen	100	493.534.500	100	489.147.909	100	99.11
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Data Sektoral	28	1.811.908.648	28	1.446.645.256	100	79.84
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	280.018.000	2	277.348.630	100	99.05
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	70.598.000	1	69.873.600	100	98.97
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	106.282.000	1	105.697.000	100	99.45
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	36.636.500	1	36.228.679	100	98.89
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks	210	230.943.700	611	228.202.436	211	98.81
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	50	230.943.700	50	228.202.436	100	98.81

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Perangkat Daerah	53	953.609.525	53	430.832.436	100	45.18
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	41.619.875	1	24.671.000	100	59.28
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	184.663.150	1	107.838.548	100	58.4
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	53	727.326.500	53	298.322.888	100	41.02
Presentase capaian								100	96.52%

1.2.2 Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Peningkatan kinerja pada Dinas Kominfo Kabupaten Jombang didukung oleh sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan Sumber Dana (Anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja. Efisiensi didapat dari rata-rata capaian kinerja dikurangi presentase realisasi anggaran Dinas Kominfo Kabupaten Jombang. Adapun Efisiensi Anggaran Dinas Kominfo Jombang adalah sebesar Rp. 594.048.922.328 atau 3,48 2 % sebesar dari pagu anggaran sebesar Rp. 20,672,902,497.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Persen	100	10.842.097.183	100	10.364.843.085	100	95.6	4,4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Tersusun Sesuai Aturan	Persen	100	159.499.000	100	140.569.750	100	88.13	11,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	118.511.000	3	114.743.750	100	96.82	3,18

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	40.988.000	5	25.826.000	100	63.01	36,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Persen	100	10.954.733.097	100	6.235.695.953	100	56.92	43,08
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	10.541.131.097	32	6.023.381.253	100	57.14	42,86
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	406.922.000	4	205.912.700	100	50.6	49,4
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.680.000	1	6.402.000	100	95.84	4,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	796.953.890	100	544.767.050	100	68.36	31,64
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	27.639.600	12	21.823.500	100	78.96	21,04
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	149.436.100	12	99.342.300	100	66.48	33,52

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	259.954.400	6	126.337.460	100	48.6	51,4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	97.949.140	5	58.351.900	100	59.57	40,43
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	25.224.000	3	12.940.000	100	51.3	48,7
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	236.750.650	5	225.971.890	100	95.45	4,55
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	1.474.842.300	100	813.661.623	100	55.17	44,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	761.040.000	12	397.781.185	100	52.27	47,73
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	713.802.300	12	415.880.438	100	58.26	41,74
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persen	100	6.943.888.689	100	5.664.432.269	100	81.57	18,43

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	88.150.000	1	45.108.280	100	51.17	48,83
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17	353.775.110	17	188.408.807	100	53.26	46,74
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	405.993.288	2	368.768.259	100	90.83	9,17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	63	3.868.054.049	63	3.836.967.923	100	99.2	0,80
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi	Persen	10	3.719.152.891	10	3.683.208.621	100	99.03	0,97
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat dan PD yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Persen	3.3	5.991.261.741	3.3	4.419.701.785	100	73.77	26,23
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	1.361.432.900	3	1.350.284.790	100	99.18	0,82

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	3	2.168.073.301	3	2.154.971.931	100	99.4	0,6
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	189.646.690	2	177.951.900	100	93.83	6,17
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik	Persen	100	5.387.174.223	100	5.188.533.666	100	96.31	3,69
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang terkoneksi jaringan intranet	Perangkat Daerah	53	3.477.075.840	53	3.272.644.532	100	94.12	5,88
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	55.771.920	1	52.657.236	100	94.42	5,58
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	3.365.532.000	1	3.203.915.594	100	95.2	4,80
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi layanan pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi	Aplikasi	2	9.075.444.448	2	2.231.931.390	100	24.59	75,41

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	354.271.500	2	349.440.850	100	98.64	1,36
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	656.707.000	1	651.915.133	100	99.27	0,73
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	2	470.941.803	2	469.294.853	100	99.65	0,35
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	2	87.500.000	2	65.962.500	100	75.39	24,61
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	366.750.000	1	366.322.500	100	99.88	0,12
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	29.700.000	1	29.025.000	100	97.73	2,27

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data Sektoral yang dipublikasikan	Persen	100	493.534.500	100	489.147.909	100	99.11	0,89
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral yang digunakan dalam portal satu data	Data Sektoral	28	1.811.908.648	28	1.446.645.256	100	79.84	20,16
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	2	280.018.000	2	277.348.630	100	99.05	0,95
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	70.598.000	1	69.873.600	100	98.97	1,03
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	106.282.000	1	105.697.000	100	99.45	0,55
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	1	36.636.500	1	36.228.679	100	98.89	1,11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik	Persen	50	230.943.700	50	228.202.436	100	98.81	1,19
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan layanan keamanan kominfo	Perangkat Daerah	53	953.609.525	53	430.832.436	100	45.18	54,82
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	41.619.875	1	24.671.000	100	59.28	40,72

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		Tingkat Efisiensi
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	184.663.150	1	107.838.548	100	58.4	41,6
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	53	727.326.500	53	298.322.888	100	41.02	58,98
Presentase capaian								100	96.52 %	3,48

Efisiensi Sumber Daya Manusia Tahun 2024

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Ketercukupan Pegawai %	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	101.8	68,56% (HKP)	33,24
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	100	56,41% (APTIKA)	43,59
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	100	55,13% (APTIKA + SANTIK)	43,59
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	102.7	53,85% SANTIK	48,85
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	211.0	53,85% SANTIK	157,15
		Nilai Evaluasi AKIP PD	98.9	51,85%	1,1

Dari tabel diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia sebagai berikut :

- Indikator Kinerja pada Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik I-PIKP di Bidang Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 33,24%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 5 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 22 orang.
- Indikator Kinerja Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK) memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 43,59%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Aplikasi Informatika sebanyak 9 orang ASN dan 7 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 26 orang.
- Indikator Kinerja Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika memiliki efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 55,13%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia sebanyak 9 orang ASN dan 7 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan

pegawai sebanyak 26 orang dan pada Bidang Statistik dan Persandian, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 3 orang ASN dan 3 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.

- Indikator Kinerja pada Indeks Pembangunan Statistik memiliki Efisiensi Sumber Daya Manusia Manusia sebesar 53,85%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia sebanyak 3 orang ASN dan 3 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Indikator Kinerja pada Indeks Keamanan Informasi memiliki Efisiensi Sumber Daya Manusia Manusia sebesar 53,85%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia sebanyak 3 orang ASN dan 3 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 13 orang.
- Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP memiliki efisiensi sumber daya manusia sebesar 51,85%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah sumber daya manusia dari Bidang Sekretariat, dimana jumlah eksiting pegawai sebanyak 10 orang ASN dan 4 orang Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja kebutuhan pegawai sebanyak 27 orang.

Semua Tugas Pokok dan Fungsi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun dengan jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia masih jauh dari ideal. Akan tetapi dengan adanya tenaga Non ASN dapat membantu berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya manusia yang ada.

Efisiensi Sarana dan Prasarana Tahun 2024

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya keterbatasan anggaran yang ada maka pengadaan sarana dan prasarana juga tidak dapat seluruhnya terpenuhi, maka diperlukan skala prioritas dalam pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor. Sehingga diharapkan dengan sarana

dan prasarana seminimal mungkin tidak menghambat hasil kinerja yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya/sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Ketercukupan Sarpras %	Tingkat Efisiensi %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Melalui Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)	101.8	100	1,80
		Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)	100	100	0,00
		Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika	100	100	0,00
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	102.7	100	2,70
		Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	211	100	111
		Nilai Evaluasi AKIP PD	98.9	100	1,1

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana Gedung kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- Indikator Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Perhitungan yang terbagi dari : (i) dimensi input; (ii) dimensi proses; (iii) dimensi output; dan (iv) dimensi outcome. Rincian dari keempat dimensi tersebut beserta variable dan indikator sebagai berikut:

Dimensi Input		
No	Variabel	Indikator
1	Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan total anggaran kegiatan IKP di tahun berjalan 2. Ketersediaan anggaran untuk perencanaan program/kegiatan terkait kebijakan teknis IKP 3. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perumusan kebijakan teknis bidang IKP 4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan monitoring IKP 5. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan perencanaan dan pengelolaan media IKP 6. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan 7. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan penguatan kapasitas sumber daya manusia IKP
2	Bahan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bahan informasi sebelum melaksanakan kegiatan IKP 2. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring cetak konvensional (surat kabar dan majalah berita) 3. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media elektronik konvensional (radio dan TV) 4. Ketersediaan bahan informasi hasil monitoring media baru (daring) 5. Ketersediaan bahan informasi narasi tunggal dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang 6. Ketersediaan bahan informasi yang berasal dari instansi

		lain 7. Ketersediaan bahan informasi sebagai hasil pertukaran bahan informasi dengan organisasi eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah
3	Sarana dan Prasarana	1. Ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informasi 2. Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi 3. Ketersediaan pedoman internal atau mekanisme terkait keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
4	Media dan Saluran Komunikasi	1. Ketersediaan media dan saluran komunikasi yang dikelola sendiri untuk tujuan pelayanan informasi dan kehumasan 2. Ketersediaan kelompok informasi masyarakat 3. Pertemuan offline maupun online dengan awak media 4. Fitur khusus untuk penyandang disabilitas 5. Ketersediaan media partner
Dimensi Proses		
No	Variabel	Indikator
5	Pengumpulan Data dan Informasi	1. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan/atau kegiatan IKP 2. Frekuensi pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyerapan aspirasi publik 3. Frekuensi penggunaan hasil riset dari organisasi atau instansi lain
6	Perencanaan	1. Jumlah rapat koordinasi internal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/non-rutin situasional/tahunan 2. Jumlah rapat koordinasi eksternal untuk tujuan perencanaan program/kegiatan rutin/ non-rutin situasional/tahunan 3. Ketersediaan dokumen "Perencanaan Program/Kegiatan", proposal, TOR, RAB, program kerja tahunan 4. Keterlibatan publik dalam penyusunan perencanaan pengelolaan IKP
7	Pelaksanaan	1. Frekuensi kegiatan diseminasi program prioritas daerah 2. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi dari sumber instansi pemerintah daerah Kabupaten Jombang 3. Frekuensi kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat melalui media baik online maupun offline termasuk tatap muka 4. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak internal instansi 5. Frekuensi kegiatan dan kerjasama bidang IKP dengan pihak eksternal instansi 6. Frekuensi kegiatan terkait dengan keterbukaan informasi publik
8	Monitoring dan Evaluasi	1. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 2. Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap media baik konvensional maupun media baru terkait proses pelaksanaan program/kegiatan IKP 3. Ketersediaan dokumen "Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi"

Dimensi Output		
No	Variabel	Indikator
9	Agenda Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan informasi tentang program prioritas daerah 2. Akses media yang digunakan untuk menerima informasi tentang program prioritas daerah 3. Pemahaman masyarakat terkait istilah PPID (Pelayanan Informasi) 4. Pengalaman masyarakat mengakses atau meminta informasi publik ke Badan Publik
10	Penilaian Publik Terhadap Teknis Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan terhadap alur permohonan informasi di instansi pemerintah 2. Kepuasan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi di instansi pemerintah 3. Kepuasan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah 4. Kepuasan terhadap kelengkapan dan aktualitas informasi yang disediakan di instansi pemerintah 5. Kepuasan terhadap kemudahan dan ketersediaan pilihan akses untuk memperoleh informasi yang disediakan instansi pemerintah 6. Kepuasan terhadap kemudahan memperoleh informasi secara cepat, dan tidak membayar 7. Kepuasan terhadap adanya penjelasan yang lengkap apabila permohonan Informasi Publik ditolak 8. Kepuasan terhadap publikasi informasi secara proaktif oleh instansi pemerintah
11	Penilaian Publik Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan media komunikasi pemerintah (co. website / buletin milik pemerintah) sebagai sumber informasi publik sangat memadai 2. Media komunikasi pemerintah dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik 3. Kecepatan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat 4. Ketepatan informasi publik pemerintah dengan kebutuhan masyarakat 5. Obyektivitas informasi publik (kesesuaian dengan realitas) 6. Kelengkapan informasi publik pemerintah 7. Cakupan informasi publik pemerintah yang berwawasan nasional dan daerah 8. Kemudahan informasi publik pemerintah untuk dipahami
Dimensi Outcome		
No	Variabel	Indikator
12	Pemenuhan Hak untuk Mengetahui	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman publik tentang hak untuk tahu 2. Pemahaman tentang hak mendapatkan penjelasan yang lengkap jika permohonan informasi publik ditolak 3. Pemahaman terhadap informasi yang boleh diminta

		masyarakat kepada instansi pemerintah daerah
13	Pemerataan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi distribusi informasi publik apakah telah merata atau belum 2. Persepsi apakah konten informasi publik telah mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat 3. Persepsi apakah layanan informasi telah memenuhi prinsip inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas 4. Persepsi terhadap keamanan data pribadi dalam pengelolaan IKP
14	Partisipasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi publik terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui 2. Partisipasi publik dalam proses-proses kebijakan pemerintah daerah

efisiensi sarana dan prasarana sebesar 1,80%. Besaran efisiensi yang kecil ini dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2024 sudah terpenuhi dalam DPPA Tahun 2024. Adapun sarana dan prasarana penunjang sasaran ini terdiri dari :

No	Uraian	Banyaknya
1	Mobil Operasional Spesifikasi : 1.5 G M/T	1 unit
2	Drone Dji Air 3	1 unit
3	Kursi Kerja	23 Buah
4	Meja Kerja	15 Buah
5	AC Split	5 unit
6	AC Standing Floor	1 unit
7	Meja Rapat B	2 Buah
8	Clip On	1 Unit
9	Laptop	1 unit
10	PC	2 Unit

- Indikator Indeks Kematangan TIK dan Indikator Indeks SPBE tidak ada efisiensi sarana dan prasarana dikarenakan capaian kinerja dan capaian sarana dan prasarana sama-sama 100%. Adapun Sarana dan Sarana Penunjang terdiri dari rekomendasi sarana prasarana Belanja TIK sesuai dengan arsitektur SPBE.

- Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) terdapat efisiensi sarana dan prasarana yaitu 2,70 besaran efisiensi ini dikarenakan semua pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dokumen RKBMD Tahun 2024 telah terpenuhi dalam DPA Tahun 2024.
- Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) terdapat efisiensi sarana dan prasarana yaitu 111 besaran efisiensi ini dikarenakan semua pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dokumen RKBMD Tahun 2024 telah terpenuhi dalam DPA Tahun 2024
- Indikator Nilai Evaluasi AKIP ada efisiensi sarana dan prasarana 1,1% besaran efisiensi ini dikarenakan semua Pengadaan barang yang dibutuhkan sebagaimana dokumen RKBMD tahun 2024 sudah terpenuhi dalam DPA Tahun 2024. Pengadaan dalam RKBMD tahun 2024 ditargetkan yaitu 10 unit dan terealisasi 10 unit, sehingga semua kebutuhan barang dapat direalisasikan dalam penganggaran Tahun 2024.

1. Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data Capaian Indikator Kinerja Daerah

**Tabel Capaian Indikator Sasaran RPJMD/Data
Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2024**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tahun 2022	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,6	3,49

Penilaian atau Evaluasi SPBE tahun 2024 terbagi dalam 4 Domain, 8 aspek dan 47 indikator. Hasil Penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 yaitu 3,49 dengan realisasi yang tercapai dari target SPBE yaitu 96,94%. Untuk hasil evaluasi perindikator dari Kemenpan RB akan diserahkan pada bulan Januari 2025.

1.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja selama tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim evaluator SAKIP Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut :

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari indentifikasi masalah berdasarkan data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjaringan ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan	Telah melaksanakan kualitas perencanaan melalui tahapan penjejangn kinerja sesuai dengan rekomendasi
2	Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi sebagai salah satu dasar penyusunan perencanaan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya	Telah melaksanakan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan kinerja organisasi sesuai dengan rekomendasi
3	Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi existing yang akurat	Telah melaksanakan internalisasi perbaikan berkelanjutan sesuai dengan rekomendasi

	sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya	
--	--	--

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama anggaran Tahun 2024. Laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Tujuan, Sasaran dan Program Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun

2024 sebagai berikut :

- **Indikator Kinerja 1 yaitu Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (I-PIKP)** Capaian 101,8% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan 4 dimensi yaitu **input** (masukan/bahan) yang diperlukan untuk melakukan kegiatan PIKP (empat) variabel, yaitu: (i) anggaran; (ii) bahan informasi; (iii) sarana dan prasarana; dan (iv) media dan saluran komunikasi, **dimensi proses** 4 (empat) variabel, yaitu:
(i) pengumpulan data dan informasi; (ii) perencanaan; (iii) pelaksanaan; dan (iv) monitoring dan evaluasi, **dimensi output** dalam I-PIKP diukur berdasarkan 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) agenda publik; (ii) penilaian publik terhadap teknis pelayanan informasi publik; dan (iii) penilaian publik terhadap akses dan kualitas informasi publik dan dimensi outcome meliputi 3 (tiga) variabel, yaitu: (i) hak untuk mengetahui; (ii) pemerataan informasi; dan (iii) partisipasi publik telah terlaksana dengan baik.
 - **Indikator Kinerja 2 yaitu Indeks Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (I-KTIK)** capaian 100% dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan : Hasil IK-TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 3,29 atau dalam kategori “Baik”. Dalam Maturity Level, nilai tersebut dimasukkan dalam Level
3. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum, tata kelola TIK

Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang dikoordinasi dan disupervisi oleh Diskominfo sudah mempunyai program yang mampu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan TIK yang direncanakan. Pengembangan organisasi sudah mempunyai progres yang baik, meski sifat keorganisasiannya masih bersifat umum (sama dengan tahun 2023). Proses tata kelola TIK sudah didukung oleh data dengan kinerja yang stabil dan sudah sesuai dengan standar tata kelola TIK nasional.

- **Indikator Kinerja 3 yaitu Indeks SPBE terkait Layanan Komunikasi dan Informatika dengan capaian 100%** dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan dalam 8 indikator SPBE meliputi : (1) Pembangunan Aplikasi SPBE (2) Layanan Pusat Data, (3) Layanan Jaringan Intra (4) Penggunaan Sistem Penghubung, (5) Manajemen Keamanan, (6) Manajemen Data (7) Layanan Pengaduan dan (8) Layanan Data Terbuka telah terlaksana dengan baik.
- **Indikator Kinerja 4 yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dengan capaian 102,7%** dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan (1) Penerapan Aspek Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah mencapai predikat baik, (2) Penerapan Aspek Metadata Statistik, dan Kode Referensi dan/atau Data Induk sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Nomor 500.14.1/1857/415.23/2023 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan statistik sektoral sudah dilengkapi dengan metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku yang ditetapkan oleh pembina. Statistik yang dihasilkan juga sudah menggunakan kode referensi kewilayahan dengan menerapkan bridging antara kode wilayah kerja statistik BPS dengan kode wilayah administrasi Kementerian Dalam Negeri. (3) Penerapan interoperabilitas data dilakukan oleh seluruh produsen data terkait. Data dari seluruh kegiatan statistik telah disebarluaskan satu pintu, melalui portal open data yang sudah dilengkapi dengan web service.

Indikator Kinerja 5 yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) capaian 211% dengan kategori Istimewa (sangat berhasil) dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem elektronik.

Berdasarkan hasil penilaian sistem elektronik yang didapatkan, maka yang akan digunakan dalam Indeks KAMI untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang adalah kategori tinggi. Hasil evaluasi akhir yang didapatkan adalah pemenuhan kerangka kerja dasar, hasil tersebut menjadi gambaran terkait kondisi keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang. Hasil evaluasi akhir yang didapatkan sesuai dengan Gambar 4.1 adalah dengan nilai 612 dan apabila dilihat pada Gambar 4.1 terdapat grafik batang yang menunjukkan kondisi keamanan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang berada di level warna kuning.



Gambar 4. 1 Tingkat kelengkapan dan kematangan keamanan informasi

- **Indikator Kinerja 6 yaitu Nilai Evaluasi AKIP** dengan capaian 98.19 kategori baik (berhasil), capaian target belum tercapai dan capaian realisasi lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Sesuai hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat dikarenakan
 - (1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu belum seluruh TIM Evaluasi Internal mendapatkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP;
 - (2) Pelaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi);
 - (3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum cukup menyelesaikan hambatan/tantangan yang terdapat dalam setiap komponen akuntabilitas kinerja, sehingga hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja belum cukup dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan kategori baik (berhasil), selanjutnya diharapkan dapat ditingkatkan dalam rangka peningkatan**

akuntabilitas kinerja dalam perencanaan, penganggaran, layanan, dan evaluasi kegiatan;

Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator Persentase PD yang telah memiliki layanan informasi dengan kategori baik (berhasil) dikarenakan Layanan Informasi yang dimaksud adalah PPID utama yaitu Dinas Kominfo dan PPID Pembantu yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku telah tercapai Target 10% yaitu 5 Perangkat Daerah memiliki PPID Pembantu dari 53 Perangkat Daerah meliputi :

1. Inspektorat Kabupaten Jombang;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang;
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang;
7. Dinas Sosial Kabupaten Jombang;
8. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang;
9. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

- **Program Aplikasi Informatika, dengan Persentase penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik** dengan kategori Istimewa (Sangat Berhasil) dengan Total layanan meliputi : Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu 50 dan Layanan Publik yaitu 5 Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik yaitu 55 yang sesuai dengan arsitektur dan masterplan SPBE dan seluruh aplikasi telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Jombang.
- **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase data Sektoral yang dipublikasikan dengan kategori baik (berhasil), dikarenakan.....**
- **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase Sistem aplikasi strategis yang berfungsi dengan baik Persentase Sistem Elektronik yang berfungsi dengan baik** dengan kategori baik (berhasil) karena sistem elektronik resmi kabupaten Jombang menggunakan

subdomain jombangkab.go.id dan menggunakan SSL sehingga dapat tercapai 100% karena telah memiliki pengamanan informasi yang bersertifikat.

B. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi diatas maka seluruh indikator dapat dikatakan baik (berhasil), namun pada indikator Nilai Evaluasi AKIP tidak mencapai target, maka diperlukan upaya-upaya untuk :

- 1) a) Melakukan penyesuaian kembali atas ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dan target kinerja pada tujuan, sasaran strategis dan program kegiatan pada dokumen perencanaan tahunberikutnya, sehingga didapat keselarasan dengan dokumenperencanaan lainnya, khususnya pada indikator tujuan “Indeks SPBE terkait layanan komunikasi dan informatika (18 indikator)” dengan target keluaran “18 indikator terkelola”, sehingga dapatdiketahui kondisi kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunperencanaan.
- b) Dalam menetapkan target kinerja terutama pada Indikator Kinerja Utama (IKU) agar dibuat dengan perhitungan yang logis dan realistis berdasarkan basis data yang memadai serta dapat menunjukkan titik berat komponen-komponen yang akan dijadikanfokus untuk kenaikan target dalam setiap indikator.
- c) Melakukan revisi atas hasil monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra, yaitu tidak hanya monitoring pada program, kegiatan dan sub kegiatan, melainkan juga pada capaian tujuan dan sasaran strategis serta memberikan analisa besertahambatan, upaya dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja.
- d) Target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja selain dimanfaatkan untuk memberikan penghargaan (reward) agar juga dapat dimanfaatkan untuk :
 - Memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja
 - Menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) atas suatu kondisi atau keadaan.
- a) Hasil pengukuran kinerja yang telah dilengkapi dengan penjelasan atas capaian kinerja, upaya dan/atau hambatan, data kinerja yang memadai sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan bukti

tindaklanjut sebagai upaya perbaikan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai kinerja (khususnya strategi dan kebijakan pada tujuan strategis “Meningkatnya kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan SPBE”)

- b) Dalam pemberian reward dan punishment atas penilaian kinerja pegawai agar dibuatkan standar/tingkatan yang jelas atas :
 - pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai)
 - pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar
- 2) a) Pada dokumen laporan kinerja agar menambahkan informasi tentang efisiensi atas sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai.
- b) Upaya dan/atau hambatan atas capaian kinerja yang telah dijelaskan dalam dokumen laporan kinerja agar tidak bersifat genera//umum, seharusnya dapat dijelaskan secara spesifik pada setiap sasaran strategis atau sasaran program
 - c) Informasi dalam laporan kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk penyesuaian aktivitas, anggaran maupun perencanaan kinerja.
- 3) a) Mengusulkan bimbingan teknis evaluasi SAKIP untuk anggota tim evaluasi SAKIP internal sehingga terdapat peningkatan kompetensi.
- b) Mengusulkan penggunaan teknologi informasi (aplikasi) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
 - c) Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja agar dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja terutama dalam penetapan target kinerja.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Secara internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jombang, 3 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN JOMBANG


ENDRO WAHYUDI, S.STP

Pembina

NIP. 198005281999121001